

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

BAPPELITBANGDA KAB. KOTIM

TAHUN 2022



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 memfokuskan pada capaian kinerja yang secara utuh tercakup dalam tujuan/sasaran strategis yang menjadi kompetensi utama dan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).

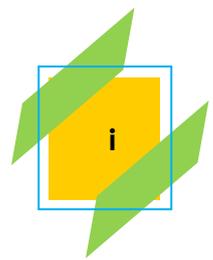
Secara keseluruhan, capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dikatakan **“Sangat Tinggi”** dengan capaian fisik sebesar 92,20%. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.506.629.899,- dari pagu anggaran sebesar Rp.9.556.738.502,-

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang ada, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala baik secara triwulan/semester atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya. Sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai lembaga teknis perencanaan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah kondisi Kabupaten Kotawaringin Timur yang diharapkan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Untuk pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai tugas dan fungsi maka Bappelitbangda Kab.Kotim fokus kepada misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (***Good Governance***)





Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Laporan kinerja (LKIP) ini masih mengacu kepada renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2026 yang disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab pemerintah telah menetapkan peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasikan, pengkhitiran, dan pelaporan kinerja pada Instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyusunan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja visi, misi, realisasi pencapaian Indikator kinerja utama dan setara dengan target yang telah ditetapkan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan ucapan alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan bentuk komitmen nyata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam peraturan menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah wujud pertanggungjawaban perangkat daerah selama satu tahun anggaran, dan merupakan suatu kewajiban dari instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana telah diterapkan dalam Rencana Strategis dan sesuai dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 berupaya membuat penilaian yang telah diukur, di evaluasi, dianalisis, dan di jabarkan secara obyektif sebagai laporan yang dapat digunakan sebagai evaluasi secara keseluruhan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah menggambarkan penerapan rencana strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang akan diharapkan tahun yang akan datang.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas Tata Kelola pemerintahan tingkat



akuntabilitas diwujudkan melalui nilai evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan hasil audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2022 telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta tujuan, sasaran strategis, dan indikator kerjanya telah berhasil di capai.

Melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah terutama perangkat daerah dengan memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Laporan ini secara substansif adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dan kepada pemerintah sesuai dengan amanat/mandat yang diterima.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) Bappelitbangda tahun 2022, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan terutama terkait kebijakan perencanaan yang dapat mempercepat penerapan prinsip-prinsip "*Good Governance*" yaitu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah Khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Bappelitbangda dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pembangunan yang akan datang.

Sampit, 11 Januari 2023

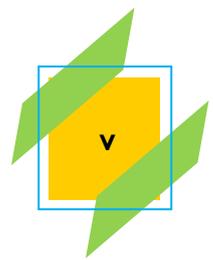
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

RAFIQ RISWANDI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741109 199903 1 004



Daftar Isi

| | |
|---|----|
| BAB 1 | 1 |
| Gambaran Umum Organisasi | 1 |
| 1. Gambaran Umum | 1 |
| a. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | 2 |
| b. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | 3 |
| c. Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | 7 |
| d. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | 10 |
| 2. Aspek Strategis Organisasi | 18 |
| a. Aspek Strategis Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 19 |
| b. Aspek Strategis Eksternal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 19 |
| 3. Isu-isu Strategis | 20 |
| a. Landasan Hukum | 22 |
| b. Maksud dan Tujuan | 23 |
| BAB 2 | 25 |
| Perencanaan Kinerja | 25 |
| 1. Rencana Strategis | 25 |
| a. Visi dan Misi Kepala Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 | 25 |
| b. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | 29 |
| c. Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur | 30 |
| d. Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur | 31 |
| 2. Rencana Kinerja Tahunan | 33 |
| 3. Perjanjian Kinerja Tahunan | 41 |
| 4. Indikator Kinerja Tahunan | 48 |
| BAB 3 | 50 |
| AKUNTABILITAS KINERJA | 50 |
| 1. Capaian Kinerja Organisasi | 50 |
| 3.1.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kab. Kotim | 52 |
| 3.1.2 Capaian Kinerja Jangka Menengah | 71 |





LAKIP BAPPELITBANGDA 2022

| | | |
|---------|---|-----|
| 3.2 | Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya | 78 |
| 3.2.1 | Realisasi Anggaran | 79 |
| 3.2.2 | Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan | 91 |
| 3.2.3 | Efisiensi | 96 |
| BAB 4 | | 105 |
| Penutup | | 105 |
| 1. | Kesimpulan | 105 |
| 2. | Strategi Peningkatan Kinerja | 106 |



Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur..... | 10 |
| Tabel 1.2 Keadaan Golongan Ruang Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim Tahun 2022..... | 10 |
| Tabel 1.3 Keadaan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Jabatan/Eselon, 2018 – 2022..... | 10 |
| Tabel 1.4 Keadaan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur..... | 10 |
| Tabel 1.5 ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan hingga Tahun 2022..... | 10 |
| Tabel 2.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi..... | 20 |
| Tabel 2.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur..... | 31 |
| Tabel 2.3 Tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan..... | 32 |
| Tabel 2.4 Program Kerja Bappelitbangda..... | 34 |
| Tabel 2.5 Jumlah Anggaran Bappelitbangda per program..... | 41 |
| Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama..... | 50 |
| Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 52 |
| Tabel 3.2 Target Sasaran Strategis Bappelitbangda Tahun 2022..... | 52 |
| Tabel 3.3 Realisasi IKU 1.1 Tahun 2023..... | 55 |
| Tabel 3.4 Capaian Kinerja SKPD Tahun 2022..... | 56 |
| Tabel 3.5 Pemetaan Jumlah Program Perangkat Daerah Dalam Tiap Dokumen..... | 58 |
| Tabel 3.6 Perhitungan Jumlah Program Perencanaan Pembangunan dan RTRW..... | 62 |
| Tabel 3.7 Realisasi IKU 2.3 Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah..... | 62 |
| Tabel 3.8 Daftar Nama OPD/UMKM yang telah lolos mengikuti seleksi Lomba Krenova Tahun 2022..... | 64 |
| Tabel 3.9 Data Implementasi/Aktualisasi Hasil Fasilitasi Lomba Krenova 2022 Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi..... | 67 |
| Tabel 3.10 Realisasi IKU 3.1 Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah..... | 68 |
| Tabel 3.11 Realisasi IKU 3.2 Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah..... | 69 |
| Tabel 3.12 Capaian Sasaran Strategis Dan kategori Capaian Bappelitbangda Tahun 2022..... | 70 |
| Tabel 3.13 Capaian Sasaran Strategis Bappelitbangda Tahun 2021-2022..... | 71 |
| Tabel 3.14 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Terhadap Target Jangka Menengah..... | 73 |
| Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Standar Normatif..... | 74 |
| Tabel 3.16 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi..... | 76 |
| Tabel 3.17 Program Penunjang Tiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappelitbangda 2022..... | 78 |
| Tabel 3.18 Realisasi dan Capaian Keuangan Bappelitbangda Tahun 2022..... | 81 |
| Tabel 3.19 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang IKU Bappelitbangda Tahun 2022..... | 92 |
| Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya di Bappelitbangda Tahun 2022..... | 97 |
| Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya di Bappelitbangda Tahun 2022..... | 97 |



Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi..... | 9 |
| Gambar 1.2 Rekapitulasi Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | 11 |
| Gambar 1.3 Persentase Keadaan Golongan Ruang Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim Tahun 2022 | 12 |
| Gambar 1.4 Keadaan Golongan Ruang Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim Tahun 2022 | 13 |
| Gambar 1.5 Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022..... | 14 |
| Gambar 1.6 Keadaan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022..... | 16 |
| Gambar 1.7 Tingkat Pendidikan Penjurangan ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2018-2022 | 18 |
| Gambar 2.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah periode 2021-2026 | 26 |



BAB 1

Gambaran Umum Organisasi

1. Gambaran Umum

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik dan akuntabilitas merupakan harapan semua pihak dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang tertata guna, bersih dan bertanggung jawab sesuai prinsip *Good Governance*, Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan visi dan misi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang di rancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtiaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyusunan kegiatan yang di cerminkan

dari pencapaian kinerja visi, misi, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan setara dengan target yang telah ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah. Kewenangan perencanaan tersebut dipertegas dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 219 ayat (1) huruf a dan d, dan Pasal 260 ayat (2), bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke depan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapatkan misi ke 4 yaitu: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)**.

a. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada bidang perencanaan pembangunan daerah, juga mempunyai peran strategis dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran mulai dari *planning*, implementasi monitoring dan evaluasi pembangunan serta merupakan salah satu lembaga teknis dilingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang



merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.

b. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan

Perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai atau menyelenggarakan fungsi berikut :

1. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
2. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah, bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Sumberdaya Alam, bidang perencanaan dan pengendalian



- pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan kewilyahan serta bidang penelitian dan pengembangan;
4. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Sumberdaya Alam, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 5. Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 6. Pengoordinasian perencanaan antar perangkat daerah baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain;
 7. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, penilaian dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
 8. Penyusunan dan pelaksanaan Renstra dan Rencana Kerja Badan; dan
 9. Penguoptimalisasian kinerja Badan untuk mencapai visi dan misi kabupaten.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah seperti yang diuraikan di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan



permukiman, penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten; dan
 - b. Pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan.
2. Pelaksanaan :
 - a. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten dalam hal:
 - Penyusunan Dokumen RPJPD,RPJMD dan RKPD;
 - Memfasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dan Kecamatan;
 - Mengoordinasikan/memfasilitasi pelaksanaan rapat Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten;
 - Mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang RKPD tingkat Provinsi; dan
 - Mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang Regional dan Musrenbang Nasional.
 - b. Pengoordinasian penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi daerah serta kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- d. Pegoordinasian Penyusunan dan analisis Pendanaan Pembangunan serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten.
3. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten.
4. Monitoring dan evaluasi :
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kecamatan/Desa; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten.
5. Penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan :
 - a. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;



- d. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten;
- e. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten; dan
- f. Pemberian Rekomendasi / Keterangan / ijin pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten.

c. Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh 45 Pegawai Negeri Sipil dengan susunan organisasi sebagai berikut :

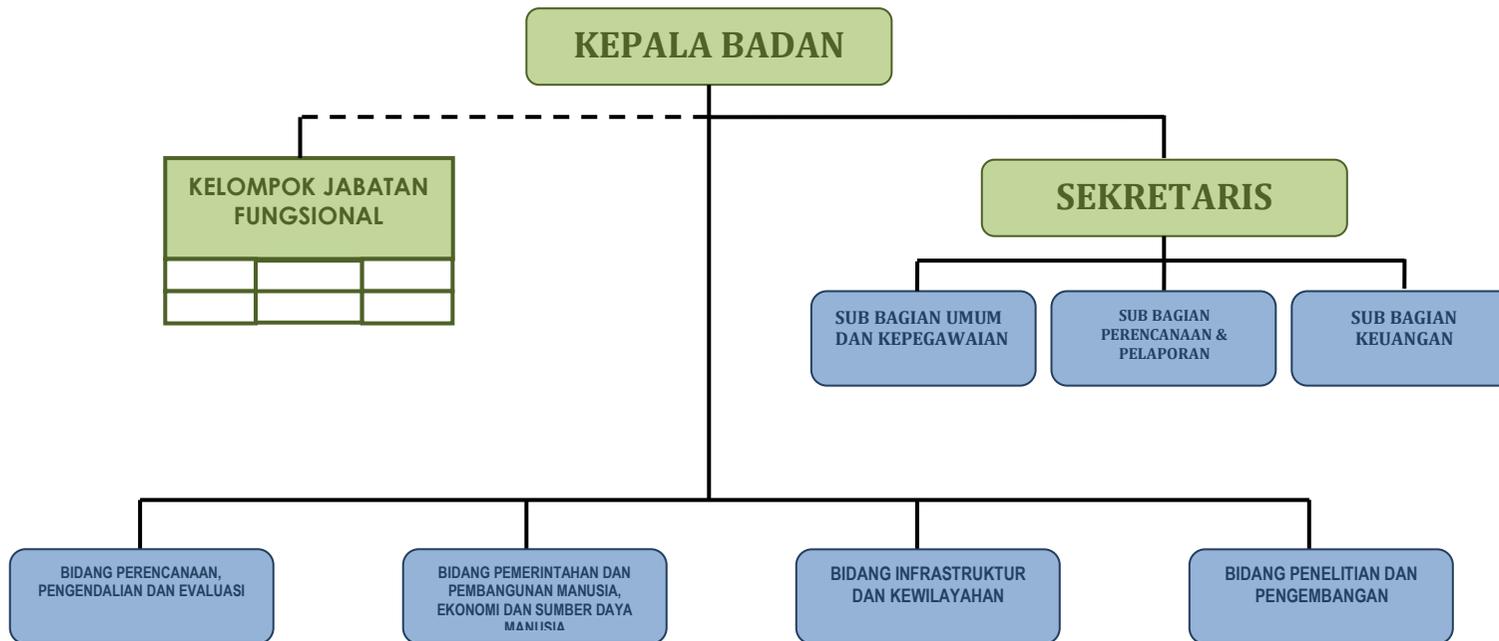
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - b. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - Sub Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam;
 - Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - Sub Bidang Pemerintahan.



- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - Sub Bidang Data dan Informasi;
 - Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman.
4. Kelompok jabatan fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

d. **Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**

1. **Sumber Daya Manusia**



Faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kinerja Organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau Sumber Daya Manusia yang ada di dalamnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, sarana dan prasarana tetapi juga yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan tugas dan fungsi harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Bappelitbangda menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur sebanyak 45 orang, terdiri dari 38 orang PNS dan 7 orang tenaga honorer/kontrak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

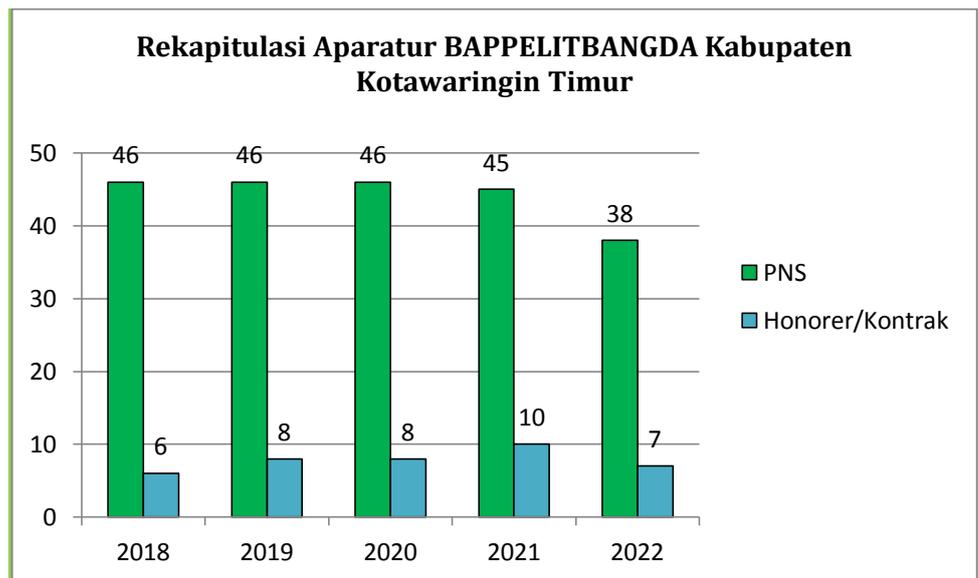
Tabel 1.1 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

| No. | | JUMLAH | | | | |
|-----|-------------------|--------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | PNS | 46 | 46 | 46 | 45 | 38 |
| 2 | Honorer / Kontrak | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| | Jumlah | 52 | 54 | 54 | 55 | 45 |

Sumber :Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2018-2022

Gambaran tentang kondisi kepegawaian dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Rekapitulasi Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur



Sumber :Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2018-2022

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, berikut ini ilustrasinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu, dan diklat penjenjangan yang pernah diikuti.

a. Keadaan Aparatur Menurut Golongan Ruang

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 diketahui bahwa keadaan Aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2022 didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 33 orang

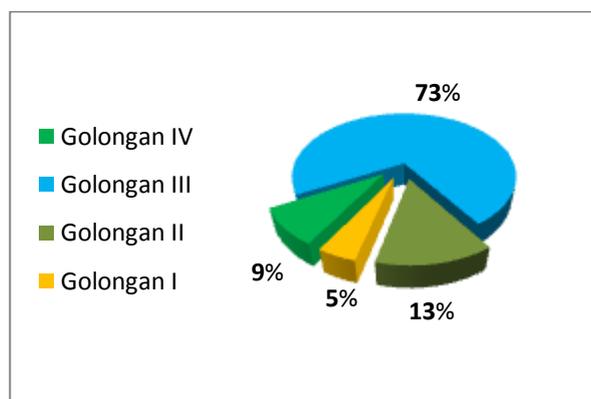
atau 73%, sedangkan golongan ruang terkecil adalah golongan I yang berjumlah 2 orang atau 5%. Untuk itu akan diupayakan peningkatan pangkat dan golongan ruang khususnya bagi pegawai golongan I dengan penyesuaian tingkat pendidikan.

Tabel 1.2 Keadaan Golongan Ruang Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim Tahun 2022

| NO. | PANGKAT/GOL/RUAN G | JUMLAH APARATUR | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Golongan IV | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 2. | Golongan III | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3. | Golongan II | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 4. | Golongan I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH | | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 |

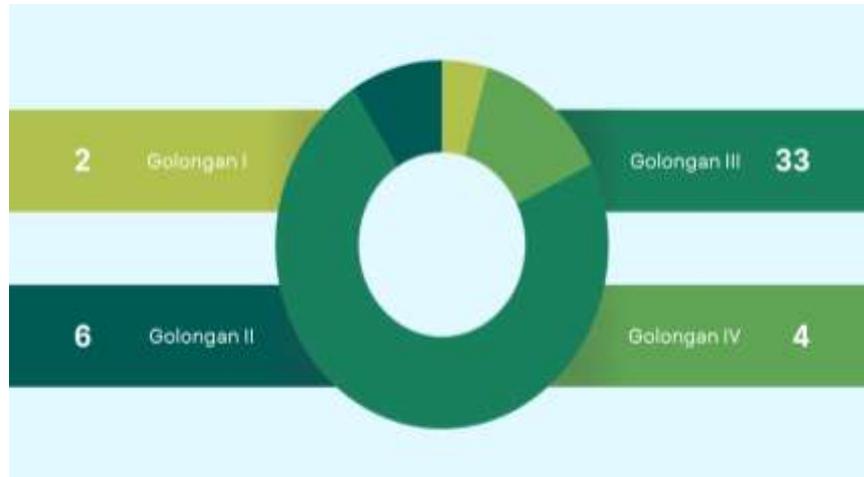
Sumber :Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2018-2022

Gambar 1.3 Persentase Keadaan Golongan Ruang Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim Tahun 2022



Secara sederhana kondisi Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim menurut golongan ruang dapat lihat dalam Gambar 1.4 berikut ini:

Gambar 1.4 Keadaan Golongan Ruang Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim Tahun 2022



Sumber :Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2018-2022

b. Keadaan Aparatur Menurut Jabatan/Eselonering

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2022 adalah : 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang, 3 (tiga) orang Eselon IV, serta 1 (satu) orang Fungsional Peneliti, 10 (sepuluh) orang Fungsional Perencana dan 23 orang non eselon.

Dengan melihat Kondisi diatas menggambarkan pegawai Bappelitbangda belum memadai, karena sesuai dengan analisa jabatan jumlah formasi belum terpenuhi keseluruhannya.

Tabel 1.3 Keadaan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Jabatan/Eselon, 2018 – 2022

| No | Jabatan | Jumlah Aparatur | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1 | Eselon II | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Eselon III | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Eselon IV | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| 4 | Fungsional Peneliti | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Fungsional Perencana | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | Staf/Pelaksana/Fungsional Umum | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Jumlah | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Sumber : Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2018-2022

Secara sederhana gambaran Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menurut Jabatan/Eselon pada Tahun 2022 dapat dilihat dalam Gambar 1.3 berikut ini :

Gambar 1.5 Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022



Sumber : Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2018-2022



c. Keadaan Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Sumber daya manusia merupakan ujung tombak dalam suatu organisasi, dimana keberadaan setiap ASN harus terspesifikasi berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Sumberdaya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional sesuai dengan bidang masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Besarnya komposisi jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, diharapkan dapat memberi andil yang cukup besar dalam pengembangan kualitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

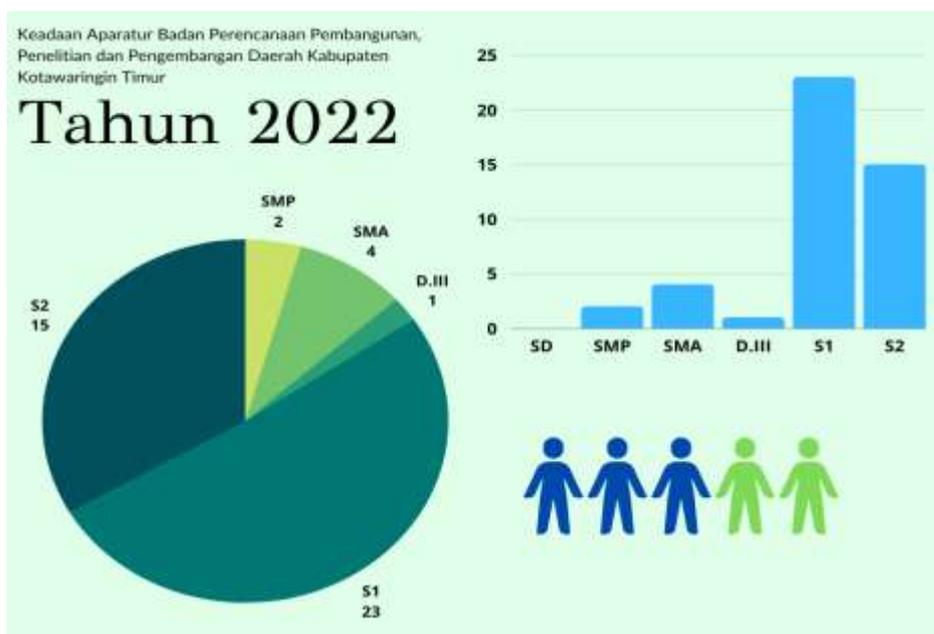
Berdasarkan Tabel 1.4 diperoleh bahwa pendidikan Aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim di dominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S1) yang berjumlah 23 orang atau 50%.

Tabel 1.4 Keadaan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

| Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| S2 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| S1 | 23 | 19 | 19 | 23 | 23 |
| D.III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SMK/SLTA Sederajat | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SMP/SLTP Sederajat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SD Sederajat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 |

Sumber : Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2018-2022

Gambar 1.6 Keadaan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022



d. Keadaan Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Struktural

Di samping pendidikan formal, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendapatkan pendidikan nonformal berupa diklat struktural maupun diklat fungsional. Data pada Tabel 1.5 menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan pada Tahun 2022 berjumlah: berjumlah 17 orang atau 44,74%. Bila dilihat dari seluruh pegawai yang telah memenuhi persyaratan sekiranya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan atau mengikuti diklat baik struktural maupun fungsional

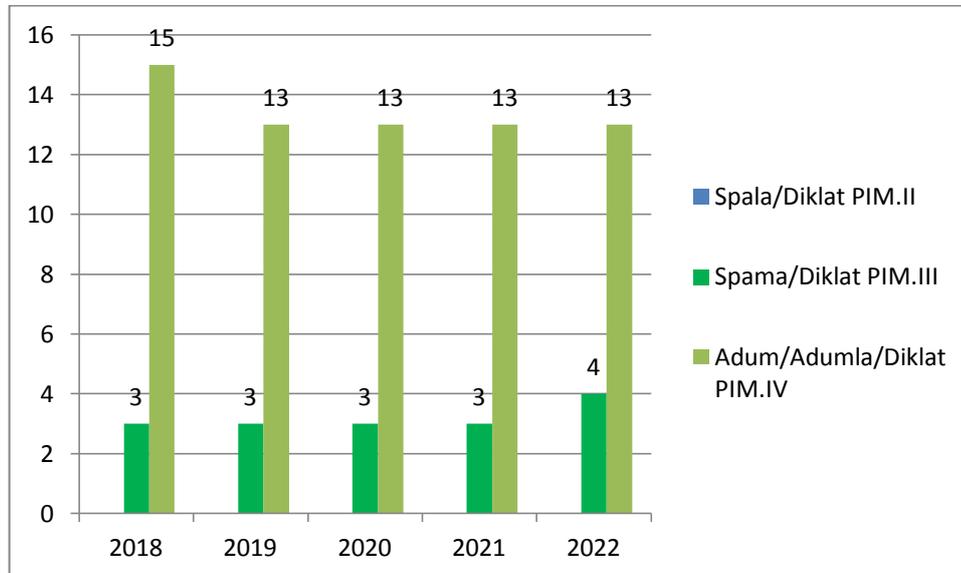
Tabel 1.5 ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan hingga Tahun 2022

| NO. | PENDIDIKAN | JUMLAH APARATUR | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1. | Spala/Diklat PIM.II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Spama/Diklat PIM.III | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3. | Adum/Adumla/Diklat PIM.IV | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| JUMLAH | | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 |

Sumber :Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2018-2022

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat Gambar 1.5 berikut ini.

Gambar 1.7 Tingkat Pendidikan Penjenjangan ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2018-2022



Sumber :Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim, 2018-2022

2. Aspek Strategis Organisasi

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, keputusan maupun pengalokasian sumberdaya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi, apa yang dikerjakan dan mengapa ia melakukan.

Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (*outline respon*) organisasi terhadap tantangan-tantangan yang mendasar yang dihadapi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan,



Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggungjawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*) sesuai dengan peta proses bisnis dan struktur organisasi maka terdapat aspek strategis internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, beberapa aspek strategis yang mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

- a. **Aspek Strategis Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
 1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotawaringin Timur;
 2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kecamatan/ Kelurahan/ Desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; dan
 5. Meningkatnya intensitas pendampingan penyusunan perencanaan ditingkat kecamatan/kelurahan/desa oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

- b. **Aspek Strategis Eksternal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
 1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kotawaringin Timur terhadap Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan



- Pengembangan Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah;
2. Kebijakan otonomi daerah;
 3. Kewenangan dan peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
 4. Sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
 5. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak;
 6. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur seperti *e-planning*, *e-monev*, *e-proc* dan sebagainya;
 7. Pesatnya perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur di berbagai sektor pembangunan;
 8. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (empat) Perguruan Tinggi dan Dewan Riset Daerah (DRD);
 9. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;
 10. Memberikan dukungan untuk menyusun *road map* ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur;
 11. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

3. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan dinamika kehidupan baik regional, nasional, maupun global. Isu-isu strategis menjadi pokok bahasan yang selalu diperhatikan dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah karena dengan berpedoman pada isu-isu strategis maka segala permasalahan yang “mungkin” akan terjadi di masa mendatang dapat diantisipasi sedini



mungkin.

Sebagai alat manajerial, perencanaan pembangunan bertujuan untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Sebagai koordinator, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotawaringin Timur melakukan kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai perangkat daerah perlu untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan 2 unsur yaitu perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan, pemahaman terhadap isu strategis diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan menyelesaikan permasalahan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral, dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh. Secara normatif, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Kotawaringin Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:



1. **Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-kegiatan.**
2. **Belum optimalnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.**

a. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tanggung jawab setiap pemerintah/ pemerintahan daerah yang disusun atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN, dengan dasar Hukum penyusunan meliputi :

1. Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 (LAN untuk perencanaan, BPKP untuk evaluasi) tentang LAKIP;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Asas Akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Asas pengelolaan keuangan negara adalah Akuntabilitas berorientasi hasil penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden RI No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 39 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2022. Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Penyusunan Laporan kinerja bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan sebenarnya tercapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 disajikan



dengan sistematika sebagai berikut :

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek startegis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

c. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek startegis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran *strategic* organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang ditetapkan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis

a. Visi dan Misi Kepala Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Dalam perencanaan perlu adanya perkembangan, keseimbangan dan berkesinambungan pembangunan di daerah sehingga di perlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah rencana pelaksanaan tahun kedua. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2022.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kotawaringin Timur, yang harus mendukung pewujudan visi Kotawaringin Timur periode 2021-2026. Dalam rangka menyatukan gerak langkah perangkat daerah guna mendukung sepenuhnya perwujudan visi Kabupaten Kotawaringin Timur, maka visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah periode 2021-2026

mengikuti visi Kotawaringin Timur, yaitu:

Gambar 2.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah periode 2021-2026



Memperhatikan visi tersebut di atas, terdapat 3 diksi yang menjadi kunci dari kondisi yang ingin dicapai yaitu mandiri, maju, dan sejahtera yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

- **Mandiri** bermakna pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- **Maju** bermakna adanya peningkatan dalam penyediaan sarana prasarana, pertumbuhan ekonomi, berkembangnya industri dan jasa, serta mampu menjawab berbagai dinamika perkembangan baik regional, nasional, maupun internasional. Dengan kata lain, maju

dapat diartikan sebagai membaiknya kesejahteraan masyarakat dan keunggulan daya saing daerah.

- **Sejahtera** ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, ekonomi, social dan budaya yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Misi Bappelitbangda, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa *Good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih) merupakan sistem pemerintahan yang bersih serta merupakan suatu pemerintahan yang efektif, efisiensi, jujur, transparan, bertanggung jawab dan berwibawa dalam melakukan manajemen pemerintahan. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih:

1. *Responsiveness* atau responsivitas adalah: daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
2. *Responsibility* atau tanggung jawab adalah; suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian layanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
3. *Accountability* atau akuntabilitas adalah: suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Faktor tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih:

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan harus didesain sedemikian rupa. Sehingga penyelenggaraan pelayanan menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan dan kepastian tentang tata cara, biaya, jadwal waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
3. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pengguna jasa dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
4. Keterbukaan, yaitu bahwa pengguna jasa dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, termasuk informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain.
5. Efisiensi, yaitu persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk layanan publik yang diberikan. Disamping itu, juga perlu dicegah adanya pengulangan di dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan, yaitu mempersyaratkan kelengkapan syarat dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait.
6. Ekonomis, yaitu agar biaya yang dipergunakan pengguna jasa dalam pemanfaatan pelayanan tetap berada dalam batasan kepatutan dan kewajaran.
7. Keadilan yang merata, yaitu cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
8. Ketepatan waktu, yaitu agar pelaksanaan pelayanan dapat di selesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan beban kinerja tiap individu.

b. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dan terukur serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang di selaraskan dengan arah kebijakan dan program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Bappelitbangda untuk periode 5 (Lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 keberadaan Renstra Bappelitbangda merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan pemerintah khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan. Sementara itu, sebagai unit pelaksana bidang perencanaan pembangunan daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pengendalian kinerja guna mendukung capaian visi misi kepala daerah tahun 2021-2026.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan dan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan yang bersih dan tuntutan mampu dan harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari target suatu organisasi yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan dirumuskan tujuan strategis maka dapat dengan tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya, sehingga dapat memperkuat perencanaan sesuai dengan prinsip *evidence based planning*.

Untuk menghadapi hal tersebut maka adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi



c. Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan diwujudkan dimasa mendatang yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi berupa pernyataan yang merefleksikan cita-cita suatu organisasi yang ingin di capai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja beserta target dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Satuan | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun | | | | | |
|-----|--|--|---|--------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Area Perencanaan | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran | Nilai | 36,83 | 37,05 | 37,30 | 37,57 | 37,99 | 38,31 |
| | | | Persentase SOPD dengan capaian kinerja \geq 76% | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Keselarasan | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Penguatan ketibangan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase implementasi rencana ketibangan | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase pemanfaatan hasil ketibangan | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

d. Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi ini mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati pihak-pihak terkait dan di tetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pentahapan perencanaan yang sesuai dengan ketentuan, pengendalian

dan evaluasi secara berkelanjutan.

2. Mendorong pelaksanaan penelitian dan pengembangan di segala bidang pembangunan.
3. Optimalisasi pelayanan kesekretariatan.

Sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di tetapkan guna mewujudkan sasaran pembangunan daerah melalui pencapaian beberapa tujuan Perangkat daerah yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan

| Visi: Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera | | | |
|---|---|--|--|
| Misi IV: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (<i>Good Governance</i>) | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Tujuan 1: Peningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Penguatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah | Optimalisasi ketersediaan dan validitas data |
| | Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | | Peningkatan jumlah, kapasitas dan kapabilitas SDM secara berkala Penguatan perencanaan pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial |
| Tujuan 2: Penguatan kelitbang dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Sasaran 3: Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Penguatan pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian dan perekayasaan | Penguatan kelembagaan kelitbang dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah |
| | | | Penguatan budaya inovasi dalam bidang perencanaan dan pelayanan publik |
| | | | Optimalisasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Swasta dalam pengembangan inovasi daerah |

2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus di capai dalam waktu satu tahun pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan suatu kuantitatif yang melekat pada indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan. Rencana Kerja Tahunan menjelaskan tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatannya.

Beberapa program kerja Bappelitbangda yang telah di rencanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Program Kerja Bappelitbangda

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | JUMLAH ANGGARAN |
|-----------------|---|---------------------|---------------|-----------------|
| | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 01 | BAPPELITBANGDA | 9.444.674.112 | 112.004.390 | 9.556.738.502 |
| 5 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 7.804.338.912 | 112.004.390 | 7.916.403.302 |
| 5 01 01 2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.184.250 | | 19.184.250 |
| 5 01 01 2.01 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.800.000 | | 17.800.000 |
| | Belanja Barang Jasa | 17.800.000 | | 17.800.000 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 17.800.000 | | 17.800.000 |
| | | | | |
| 5 01 01 2.01 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.324.250 | | 1.324.250 |
| | Belanja Barang Jasa | 1.324.250 | | 1,324,250 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1,324,250 | | 1,324,250 |
| | | | | |
| 5 01 01 2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.993.439.790 | | 5.993.439.790 |
| 5 01 01 2.02 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.991.779.890 | | 5.991.779.890 |
| | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 3.194.339.890 | | 3.194.339.890 |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 2.386.352.612 | | 2.386.352.612 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 218.730.260 | | 218.730.260 |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 200.910.080 | | 200.910.080 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 50.050.000 | | 50.050.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 66.570.000 | | 66.570.000 |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 142.000.040 | | 142.000.040 |
| | Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS | 7.420.000 | | 7.420.000 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 2.253.318 | | 2.253.318 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 100.370.040 | | 100.370.040 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 6.046.320 | | 6.046.320 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 13.637.220 | | 13.637.220 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | PAGU ANGGARAN (Rp.-) | | JUMLAH ANGGARAN |
|---------|---|----------------------|---------------|-----------------|
| | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5 1 01 02 | 2.797.440.000 | - | 2.797.440.000 |
| | 5 1 01 02 01 0001 | 2.797.440.000 | - | 2.797.440.000 |
| 5 01 01 | 2.02 05 | 999.900 | - | 999.900 |
| | 5 1 02 | 999.900 | - | 999.900 |
| | 5 1 02 01 01 0024 | 999.900 | - | 999.900 |
| 5 01 01 | 2.02 07 | 660.000 | - | 660.000 |
| | 5 1 02 | 660.000 | - | 660.000 |
| | 5 1 02 01 01 0024 | 660.000 | - | 660.000 |
| 5 01 01 | 2.05 | 186.606.000 | - | 186.606.000 |
| 5 01 01 | 2.05 02 | 44.600.000 | - | 44.600.000 |
| | 5 1 02 | 44.600.000 | - | 44.600.000 |
| | 5 1 02 01 01 0074 | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| | 5 1 02 01 01 0076 | 40.600.000 | - | 40.600.000 |
| 5 01 01 | 2.05 09 | 142.006.000 | - | 142.006.000 |
| | 5 1 02 | 142.006.000 | - | 142.006.000 |
| | 5 1 02 02 12 0003 | 25.000.000 | - | 25.000.000 |
| | 5 1 02 04 01 0001 | 113.816.000 | - | 113.816.000 |
| | 5 1 02 04 01 0003 | 3.190.000 | - | 3.190.000 |
| 5 01 01 | 2.06 | 665.443.850 | - | 665.443.850 |
| 5 01 01 | 2.06 01 | 17.000.750 | - | 17.000.750 |
| | 5 1 02 | 17.000.750 | - | 17.000.750 |
| | 5 1 02 01 01 0031 | 17.000.750 | - | 17.000.750 |
| 5 01 01 | 2.06 04 | 4.132.500 | - | 4.132.500 |
| | 5 1 02 | 4.132.500 | - | 4.132.500 |
| | 5 1 02 01 01 0004 | 4.132.500 | - | 4.132.500 |
| 5 01 01 | 2.06 05 | 6.250.000 | - | 6.250.000 |
| | 5 1 02 | 6.250.000 | - | 6.250.000 |
| | 5 1 02 01 01 0024 | 6.250.000 | - | 6.250.000 |
| 5 01 01 | 2.06 06 | 37.440.000 | - | 37.440.000 |
| | 5 1 02 | 37.440.000 | - | 37.440.000 |
| | 5 1 02 01 01 0024 | 37.440.000 | - | 37.440.000 |
| 5 01 01 | 2.06 007 | 78.088.600 | - | 78.088.600 |
| | 5 1 02 | 78.088.600 | - | 78.088.600 |
| | 5 1 02 01 01 0024 | 26.093.500 | - | 26.093.500 |
| | 5 1 02 01 01 0025 | 44.099.100 | - | 44.099.100 |
| | 5 1 02 01 01 0029 | 7.896.000 | - | 7.896.000 |
| 5 01 01 | 2.06 08 | 39.000.000 | - | 39.000.000 |
| | 5 1 02 | 39.000.000 | - | 39.000.000 |
| | 5 1 02 01 01 0052 | 35.000.000 | - | 35.000.000 |
| | 5 1 02 01 01 0053 | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 5 01 01 | 2.06 09 | 483.532.000 | - | 483.532.000 |
| | 5 1 02 | 483.532.000 | - | 483.532.000 |
| | 5 1 02 04 01 0001 | 473.672.000 | - | 473.672.000 |
| | 5 1 02 04 01 0003 | 9.860.000 | - | 9.860.000 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | JUMLAH ANGGARAN |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------------|
| | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 01 01 2,07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 11.190.000 | 112.094.390 | 123.284.390 |
| 5 01 01 2,07 10 | Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 680.000 | 48.406.380 | 49.086.380 |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | | 680.000 |
| 5 1 01 03 07 0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | | 680.000 |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | 48.406.380 | 48.406.380 |
| 5 2 02 10 01 0002 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | - | 40.183.880 | 40.183.880 |
| 5 2 02 10 02 0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | - | 8.222.500 | 8.222.500 |
| 5 01 01 2,07 11 | Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Peralatan Produser Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 18.510.000 | 63.658.010 | 82.168.010 |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | | 680.000 |
| 5 1 01 03 07 0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | | 680.000 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 9.830.000 | - | 9.830.000 |
| 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 7.280.000 | - | 7.280.000 |
| 5 1 02 01 01 0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.550.000 | | 2.550.000 |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | 63.658.010 | 63.658.010 |
| 5 2 02 06 01 0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | - | 39.820.000 | 39.820.000 |
| 5 2 02 10 02 0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | - | 15.374.260 | 15.374.260 |
| 5 2 02 10 02 0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | - | 8.463.750 | 8.463.750 |
| 5 01 01 2,08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 687.383.272 | | 687.383.272 |
| 5 01 01 2,08 01 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| 5 1 02 01 01 0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| 5 01 01 2,08 02 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 210.311.546 | | 210.311.546 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 210.311.546 | | 210.311.546 |
| 5 1 02 02 01 0059 | Belanja Tagihan Telepon | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| 5 1 02 02 01 0061 | Belanja Tagihan Listrik | 162.266.546 | | 162.266.546 |
| 5 1 02 02 01 0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 45.045.000 | | 45.045.000 |
| 5 01 01 2,08 04 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 474.991.726 | | 474.991.726 |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | 245.300.000 | | 245.300.000 |
| 5 1 01 03 07 0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan | 221.060.000 | | 221.060.000 |
| 5 1 01 03 07 0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 8.160.000 | | 8.160.000 |
| 5 1 01 03 07 0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 16.080.000 | | 16.080.000 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 229.691.726 | | 229.691.726 |
| 5 1 02 01 01 0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 135.200 | | 135.200 |
| 5 1 02 01 01 0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9.969.300 | | 9.969.300 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.000.000 | | 8.000.000 |
| 5 1 02 02 01 0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 104.429.208 | | 104.429.208 |
| 5 1 02 02 01 0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 8.250.000 | | 8.250.000 |
| 5 1 02 02 01 0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 54.214.604 | | 54.214.604 |
| 5 1 02 02 01 0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | - | | - |
| 5 1 02 02 01 0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 27.107.302 | | 27.107.302 |
| 5 1 02 02 02 0005 | Belanja turan jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 14.592.000 | | 14.592.000 |
| 5 1 02 02 02 0006 | Belanja turan jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 604.800 | | 604.800 |
| 5 1 02 02 02 0007 | Belanja turan jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 1.289.312 | | 1.289.312 |
| 5 01 01 2,09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 243.171.750 | - | 243.171.750 |
| 5 01 01 2,09 01 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jibatan | 95.916.750 | | 95.916.750 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 95.916.750 | | 95.916.750 |
| 5 1 02 01 01 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18.636.750 | | 18.636.750 |
| 5 1 02 03 02 0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 77.280.000 | | 77.280.000 |

LAKIP BAPPELITBANGDA 2022

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | JUMLAH ANGGARAN |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------------|
| | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 01 01 2,00 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 25.695.000 | - | 25.695.000 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 25.695.000 | - | 25.695.000 |
| 5 1 02 01 01 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6.895.000 | - | 6.895.000 |
| 5 1 02 02 01 0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertizinan | 18.800.000 | - | 18.800.000 |
| 5 01 01 2,00 10 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Karasa dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 107.290.000 | - | 107.290.000 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 107.290.000 | - | 107.290.000 |
| 5 1 02 03 02 0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 2.160.000 | - | 2.160.000 |
| 5 1 02 03 02 0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 10.950.000 | - | 10.950.000 |
| 5 1 02 03 02 0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 5.520.000 | - | 5.520.000 |
| 5 1 02 03 03 0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 88.660.000 | - | 88.660.000 |
| 5 01 01 2,00 11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Karasa dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.270.000 | - | 12.270.000 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 12.270.000 | - | 12.270.000 |
| 5 1 02 01 01 0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.250.000 | - | 1.250.000 |
| 5 1 02 03 02 0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 7.190.000 | - | 7.190.000 |
| 5 1 02 03 02 0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1.830.000 | - | 1.830.000 |
| 5 1 02 03 02 0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 5 01 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 872.488.950 | - | 872.488.950 |
| 5 01 02 2,01 | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 557.243.750 | - | 557.243.750 |
| 5 01 02 2,01 02 | Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 123.696.550 | - | 123.696.550 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 123.696.550 | - | 123.696.550 |
| 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.784.550 | - | 3.784.550 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.280.000 | - | 8.280.000 |
| 5 1 02 02 01 0004 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | - | - | - |
| 5 1 02 04 01 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 111.632.000 | - | 111.632.000 |
| 5 01 02 2,01 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik | 28.977.900 | - | 28.977.900 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 28.977.900 | - | 28.977.900 |
| 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11.821.400 | - | 11.821.400 |
| 5 1 02 01 01 0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 228.300 | - | 228.300 |
| 5 1 02 01 01 0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 91.200 | - | 91.200 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15.035.000 | - | 15.035.000 |
| 5 1 02 02 01 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, | 400.000 | - | 400.000 |
| 5 1 02 02 01 0007 | Honorarium Rohanawan | 400.000 | - | 400.000 |
| 5 1 02 02 01 0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemozetan | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 5 01 02 2,01 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum DPRD/Lintas DPRD | 39.275.000 | - | 39.275.000 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 39.275.000 | - | 39.275.000 |
| 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9.625.000 | - | 9.625.000 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 16.010.000 | - | 16.010.000 |
| 5 1 02 02 01 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Pan Itu | 400.000 | - | 400.000 |
| 5 1 02 02 01 0007 | Honorarium Rohanawan | 400.000 | - | 400.000 |
| 5 1 02 02 01 0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemozetan | - | - | - |
| 5 1 02 04 01 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.840.000 | - | 12.840.000 |
| 5 01 02 2,01 05 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota | 105.216.600 | - | 105.216.600 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 105.216.600 | - | 105.216.600 |
| 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 49.258.600 | - | 49.258.600 |
| 5 1 02 01 01 0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | - | - | - |
| 5 1 02 01 01 0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | - | - | - |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 27.250.000 | - | 27.250.000 |
| 5 1 02 02 01 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, | 400.000 | - | 400.000 |
| 5 1 02 02 01 0007 | Honorarium Rohanawan | 400.000 | - | 400.000 |
| 5 1 02 02 01 0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemozetan | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 5 1 02 04 01 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 25.905.000 | - | 25.905.000 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | JUMLAH ANGGARAN |
|-----------------|---|---------------------|---------------|-----------------|
| | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 01 02 2.01 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Koordinasi Menengah Kecamatan | 76.995.000 | | 76.995.000 |
| | Belanja Barang Jasa | 76.995.000 | | 76.995.000 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 8.295.000 | | 8.295.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 65.800.000 | | 65.800.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.820.000 | | 2.820.000 |
| 5 01 02 2.01 07 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 183.082.700 | | 183.082.700 |
| | Belanja Barang Jasa | 183.082.700 | | 183.082.700 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 81.382.700 | | 81.382.700 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 90.660.000 | | 90.660.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.040.000 | | 11.040.000 |
| 5 01 02 2.02 | Kegiatan Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 118.924.000 | | 118.924.000 |
| 5 1 2 2.02 01 | Sub Kegiatan Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 72.299.000 | | 72.299.000 |
| | Belanja Barang Jasa | 72.299.000 | | 72.299.000 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.425.000 | | 2.425.000 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 16.750.000 | | 16.750.000 |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 400.000 | | 400.000 |
| | Honorarium Rohanbwan | 400.000 | | 400.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 52.324.000 | | 52.324.000 |
| 5 1 2 2.03 00 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SPPD | 46.625.000 | | 46.625.000 |
| | Belanja Barang Jasa | 46.625.000 | | 46.625.000 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 31.900.000 | | 31.900.000 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 13.000.000 | | 13.000.000 |
| 5 1 02 2.03 | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 196.313.200 | | 196.313.200 |
| 5 1 2 2.03 01 | Sub Kegiatan Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 85.335.850 | | 85.335.850 |
| | Belanja Barang Jasa | 85.335.850 | | 85.335.850 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.495.850 | | 2.495.850 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 38.250.000 | | 38.250.000 |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | Honorarium Rohanbwan | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 42.190.000 | | 42.190.000 |
| 5 1 2 2.03 03 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 110.977.350 | | 110.977.350 |
| | Belanja Barang Jasa | 110.977.350 | | 110.977.350 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 19.197.350 | | 19.197.350 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 25.500.000 | | 25.500.000 |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 800.000 | | 800.000 |
| | Honorarium Rohanbwan | 400.000 | | 400.000 |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 59.830.000 | | 59.830.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.250.000 | | 3.250.000 |
| 5 1 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 684.564.250 | | 684.564.250 |
| 5 1 3 2.01 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 396.046.100 | | 396.046.100 |
| 5 1 3 2.01 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPPD, RPPM dan RPOP) | 16.555.000 | | 16.555.000 |
| | Belanja Barang Jasa | 16.555.000 | | 16.555.000 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.905.000 | | 2.905.000 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.650.000 | | 13.650.000 |

| KODE | | | | | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | JUMLAH ANGGARAN |
|------|---|---|------|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan Asetisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 67.045.000 | | 67.045.000 |
| | | | | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 67.045.000 | | 67.045.000 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.195.000 | | 3.195.000 |
| | | | | 5 1 02 04 01 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 63.850.000 | | 63.850.000 |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 3.430.000 | | 3.430.000 |
| | | | | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 3.430.000 | | 3.430.000 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.430.000 | | 3.430.000 |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 206.074.800 | | 206.074.800 |
| | | | | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 206.074.800 | | 206.074.800 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.978.800 | | 6.978.800 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | - | | - |
| | | | | 5 1 02 02 01 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | - | | - |
| | | | | 5 1 02 02 01 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat | - | | - |
| | | | | 5 1 02 02 01 0007 | Honorarium Rohanawan | - | | - |
| | | | | 5 1 02 02 01 0009 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Kependidikan | 118.000.000 | | 118.000.000 |
| | | | | 5 1 02 04 01 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 81.096.000 | | 81.096.000 |
| | | | | 5 1 02 04 01 0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | - | | - |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 05 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 5.400.000 | | 5.400.000 |
| | | | | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 5.400.000 | | 5.400.000 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | - | | - |
| | | | | 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.400.000 | | 5.400.000 |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 06 | Sub Kegiatan Asetisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 7.250.000 | | 7.250.000 |
| | | | | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 7.250.000 | | 7.250.000 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | - | | - |
| | | | | 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.250.000 | | 7.250.000 |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 08 | Sub Kegiatan Asetisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 90.291.300 | | 90.291.300 |
| | | | | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 90.291.300 | | 90.291.300 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9.026.300 | | 9.026.300 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.825.000 | | 10.825.000 |
| | | | | 5 1 02 02 01 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 400.000 | | 400.000 |
| | | | | 5 1 02 02 01 0007 | Honorarium Rohanawan | 400.000 | | 400.000 |
| | | | | 5 1 02 04 01 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 69.640.000 | | 69.640.000 |
| 5 | 1 | 3 | 2,02 | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 113.056.000 | | 113.056.000 |
| 5 | 1 | 3 | 2,02 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 7.885.000 | | 7.885.000 |
| | | | | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 7.885.000 | | 7.885.000 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.835.000 | | 1.835.000 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.050.000 | | 6.050.000 |
| 5 | 1 | 3 | 2,02 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 76.114.000 | | 76.114.000 |
| | | | | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 76.114.000 | | 76.114.000 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.050.000 | | 5.050.000 |
| | | | | 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.900.000 | | 3.900.000 |
| | | | | 5 1 02 04 01 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 67.164.000 | | 67.164.000 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | JUMLAH ANGGARAN |
|---------------|--|---------------------|---------------|-----------------|
| | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 1 3 2.02 05 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPPD, RPJMD dan RKPD) | 5.085.000 | | 5.085.000 |
| | Belanja Barang jasa | 5.085.000 | | 5.085.000 |
| | 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.835.000 | | 1.835.000 |
| | 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.250.000 | | 3.250.000 |
| 5 1 3 2.02 08 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 23.972.000 | | 23.972.000 |
| | Belanja Barang jasa | 23.972.000 | | 23.972.000 |
| | 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 23.972.000 | | 23.972.000 |
| 5 1 3 2.03 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 175.462.150 | | 175.462.150 |
| 5 1 3 2.03 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPPD, RPJMD dan RKPD) | 12.220.000 | | 12.220.000 |
| | Belanja Barang jasa | 12.220.000 | | 12.220.000 |
| | 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 520.000 | | 520.000 |
| | 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.700.000 | | 11.700.000 |
| 5 1 3 2.03 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur | 12.770.100 | | 12.770.100 |
| | Belanja Barang jasa | 12.770.100 | | 12.770.100 |
| | 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 480.100 | | 480.100 |
| | 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.250.000 | | 3.250.000 |
| | 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9.040.000 | | 9.040.000 |
| | 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | - | | - |
| 5 1 3 2.03 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 150.472.050 | | 150.472.050 |
| | Belanja Barang jasa | 150.472.050 | | 150.472.050 |
| | 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 703.050 | | 703.050 |
| | 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.275.000 | | 13.275.000 |
| | 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 135.374.000 | | 135.374.000 |
| | 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.120.000 | | 1.120.000 |
| 5 1 3 2.02 05 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPPD, RPJMD dan RKPD) | 5.085.000 | | 5.085.000 |
| | Belanja Barang jasa | 5.085.000 | | 5.085.000 |
| | 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.835.000 | | 1.835.000 |
| | 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.250.000 | | 3.250.000 |
| 5 1 3 2.02 08 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 23.972.000 | | 23.972.000 |
| | Belanja Barang jasa | 23.972.000 | | 23.972.000 |
| | 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 23.972.000 | | 23.972.000 |
| 5 1 3 2.03 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 175.462.150 | | 175.462.150 |
| 5 1 3 2.03 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPPD, RPJMD dan RKPD) | 12.220.000 | | 12.220.000 |
| | Belanja Barang jasa | 12.220.000 | | 12.220.000 |
| | 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 520.000 | | 520.000 |
| | 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.700.000 | | 11.700.000 |
| 5 1 3 2.03 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur | 12.770.100 | | 12.770.100 |
| | Belanja Barang jasa | 12.770.100 | | 12.770.100 |
| | 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 480.100 | | 480.100 |
| | 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.250.000 | | 3.250.000 |
| | 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9.040.000 | | 9.040.000 |
| | 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | - | | - |
| 5 1 3 2.03 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 150.472.050 | | 150.472.050 |
| | Belanja Barang jasa | 150.472.050 | | 150.472.050 |
| | 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 703.050 | | 703.050 |
| | 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.275.000 | | 13.275.000 |
| | 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 135.374.000 | | 135.374.000 |
| | 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.120.000 | | 1.120.000 |

| KODE | | | | | | | | | | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | JUMLAH ANGGARAN |
|-----------------------|---|---|------|----|---|----|----|----|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | | | | 2 | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | 3 |
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 2 | | | | | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | 83.290.000 | - | 83.290.000 |
| 5 | 5 | 2 | 2.01 | | | | | | | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 5 | 5 | 2 | 2.01 | 12 | | | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | | - |
| 5 | 5 | 2 | 2.03 | | | | | | | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 25.000.000 | - | 25.000.000 |
| 5 | 5 | 2 | 2.03 | 04 | | | | | | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.860.000 | | 6.860.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.500.000 | | 6.500.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.640.000 | | 11.640.000 |
| 5 | 5 | 2 | 2.04 | | | | | | | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 57.290.000 | - | 57.290.000 |
| 5 | 5 | 2 | 2.04 | 01 | | | | | | Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 32.290.000 | | 32.290.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 32.290.000 | | 32.290.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.375.000 | | 3.375.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 540.000 | | 540.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 3.750.000 | | 3.750.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.375.000 | | 6.375.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | - | | - |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 05 | 01 | 0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 13.250.000 | | 13.250.000 |
| 5 | 5 | 2 | 2.04 | 04 | | | | | | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangannya | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.560.000 | | 6.560.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.500.000 | | 6.500.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.100.000 | | 3.100.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0007 | Honorarium Rohanawan | 400.000 | | 400.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.640.000 | | 5.640.000 |
| | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 2.800.000 | | 2.800.000 |
| JUMLAH BELANJA | | | | | | | | | | | 9.444.674.112 | 112.064.390 | 9.556.738.502 |

Dengan Total anggaran per program seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 Jumlah Anggaran Bappelitbangda per program

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|----------------------|------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.916.403.302 | APBD |
| 2 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 872.480.950 | APBD |
| 3 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 684.564.250 | APBD |
| 4 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 83.290.000 | APBD |
| | Total | 9.556.738.502 | |

3. Perjanjian Kinerja Tahunan

Perjanjian kinerja merupakan komitmen rencana kerja yang akan di capai oleh kabupaten Kotawaringin Timur. Perjanjian kinerja menggambarkan pencapaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja yang berisikan komitmen dan target yang akan di capai oleh suatu instansi dalam tahun berjalan kepada instansi yang lebih tinggi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja prestasi pemerintah.

Untuk mengakomodir Perjanjian Kinerja tersebut agar sesuai dengan peraturan serta untuk mewujudkan komitmen kepala Bappelitbangda dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

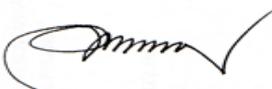
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai 3 sasaran strategis dengan indikator kinerja seperti tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si**
 NIP : 19741109 199903 1 004
 Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
 Jabatan : KEPALA BADAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|----------------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Presentase SOPD dengan capaian kinerja \geq 76% | 37,05 100% |
| 2 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 100% 100% 100% |
| 3 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Presentase implementasi rencana kelitbangan | 100% 100% |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|-------------------|------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | 7.916.403.302 | APBD |
| 2 | Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 872.480.950 | APBD |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 684.564.250 | APBD |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | 83.290.000 | APBD |

| | |
|---|--|
| <p>Pihak Kedua : Pihak Kedua : BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR</p>  <p>H. Halikunor, S.H., M.M.</p> | <p>Sampit, 03 Januari 2022 Sampit, 03 Januari 2022</p> <p>Pihak Pertama : Pihak Pertama : KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR</p>  <p>RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si. NIP. 19741109 199903 1 004</p> |
|---|--|

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **FAHRUZZAIN , S.T., M.T.**
 NIP : 19691217 200003 1 005
 Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
 Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase Policy brief yang disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan daerah | 100% |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|------------------------------------|-------------------|------|
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | 83.290.000 | APBD |
| | Jumlah | 83.290.000 | |

Sampit, 03 Januari 2022

Pihak Kedua:

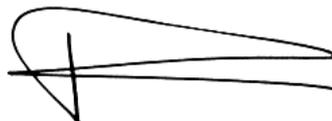
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID LITBANG BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



FAHRUZZAIN , S.T., M.T.
NIP. 19691217 200003 1 005

**BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **JANA H. OJAI, SE, M.AP**
 NIP : 19760407 199703 1 003
 Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
 Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
 DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Akutabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi (RPJPD, RPJMD, RKPD) | 100% |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp.) | KET |
|----|---|--------------------|------|
| 1 | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 872.480.950 | APBD |
| | Jumlah | 872.480.950 | |

| | |
|--|---|
| <p><u>Pihak Kedua:</u></p> <p>KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,</p>  <p><u>RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si</u> NIP. 197411091999031004</p> | <p><u>Sampit, 03 Januari 2022</u></p> <p><u>Pihak Pertama:</u></p> <p>KABID P2EPD BAPPELITBANGDA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,</p>  <p><u>JANA H. OJAI, S.E., M.AP</u> NIP. 19760407 199703 1 003</p> |
|--|---|

**BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA,
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

| | | |
|------------------|---|---|
| Nama | : | MAULIDAH, S.AP. |
| NIP | : | 19740319 199302 2 002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina / IVa |
| Jabatan | : | KABID PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| SOPD | : | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| Tahun | : | 2022 |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Tingkat keselarasan Renstra PD mitra Bidang P2MPSDA terhadap RPJMD | 100% |
| | | Tingkat keselarasan Renja PD mitra Bidang P2MPSDA terhadap RKP | 100% |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|---|--------------------|------|
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 509.102.100 | APBD |
| | Jumlah | 509.102.100 | |

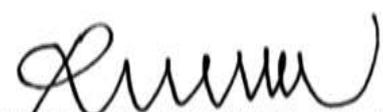
| | |
|--|--|
| <p>Pihak Kedua:</p> <p>KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,</p>  <p>RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si NIP. 197411091999031004</p> | <p>Sampit, 03 Januari 2022</p> <p>Pihak Pertama:</p> <p>KABID P2MPSDA BAPPELITBANGDA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,</p>  <p>MAULIDAH, S.AP NIP. 19740319 199302 2 002</p> |
|--|--|

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

| | |
|------------------|---|
| Nama | : RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si. |
| NIP | : 19810406 201001 1 012 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Tingkat I / IIIId |
| Jabatan | : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN |
| SOPD | : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| Tahun | : 2022 |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Tingkat keselarasan Renstra PD mitra Bidang Infracwil terhadap RPJMD | 100% |
| | | Tingkat keselarasan Renja PD mitra Bidang Infracwil terhadap RKPD | 100% |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|--------------------|------|
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 175.462.150 | APBD |
| | Jumlah | 175.462.150 | |

| | |
|--|--|
| <p>Pihak Kedua:</p> <p>KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,</p>  <p>RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si NIP. 197411091999031004</p> | <p>Sampit, 03 Januari 2022</p> <p>Pihak Pertama:</p> <p>KABID INFRAWIL BAPPELITBANGDA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,</p>  <p>RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si NIP. 19810406 201001 1 012</p> |
|--|--|

Dengan demikian target kinerja yang di perjanjikan juga mencakup *outcome* yang di hasilkan dari kegiatan sehingga terwujudnya kesinambungan kinerja dalam setiap bidang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Setiap instansi pemerintah pasti membuat indikator kinerja utama karena ada tujuannya. Adapun beberapa tujuan dibalik pembuatan indikator tersebut adalah: Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut. Sebagaimana ditetapkannya Indikator Kinerja Bappelitbangda yang di keluarkan melalui Surat Keputusan Bupati dan di jadikan sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang telah di tetapkan. Berikut Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026.



4. Indikator Kinerja Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026**

- Tugas Pokok : Bappelitbangda mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya
- Fungsi :
 - 1 Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkatan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2 Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD);
 - 3 Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan teknologi daerah;
 - 4 Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta bidang penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi.
 - 5 Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi;
 - 6 Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - 7 Pengoordinasian perencanaan antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain;
 - 8 Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan;
 - 9 Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Badan; dan
 - 10 Penguoptimalisasian kinerja Badan untuk mencapai visi dan misi daerah.

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama

| Sasaran Bappelitbangda | Indikator Sasaran Bappelitbangda | Satuan | Formula | Sumber Data | |
|--|--|--|---|------------------------------------|-------------------|
| | | | | Bidang utama | Bidang pendamping |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Sasaran 1 | | | | | |
| Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, monitoring dan dan evaluasi pembangunan daerah | Nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran | nilai dalam poin | Hasil penilaian SAKIP | Semua Bidang | Sekretariat |
| | Persentase SOPD dengan capaian kinerja \geq 76% | persentase | $\frac{\text{Jumlah SOPD yang berkinerja } \geq 76\%}{\text{Jumlah SOPD di Kab. Kotim}} \times 100\%$ | Semua Bidang | |
| Sasaran 2 | | | | | |
| Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD | persentase | $\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$ | Semua Bidang | Sekretariat |
| | | | $\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$ | | |
| | Penjabaran konsistensi program RKPDe dalam APBD | persentase | $\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$ | | |
| | | | $\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$ | | |
| Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | persentase | $\frac{\text{Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang}}{\text{Dokumen RTRW}} \times 100\%$ | Semua Bidang | Sekretariat | |
| | | | | | |
| Sasaran 3 | | | | | |
| Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | persentase | $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total Perangkat Daerah}} \times 100\%$ | Bidang penelitian dan Pengembangan | Semua Bidang |
| | | | $\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$ | | |
| | Persentase implementasi rencana kelitbangan | persentase | $\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$ | | |
| | | | | | |

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR


RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
Pembina /IV/b
NIP. 197411091999031004

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen kinerja merupakan suatu mekanisme yang dilaksanakan oleh organisasi untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *ouput* dan *outcome* yang ditargetkan. Mekanisme ini dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja di berbagai tingkatan mulai dari tujuan organisasi hingga tingkat aktivitas. Pengukuran ini sebagai proses kontrol terhadap pencapaian tujuan utama dari organisasi yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja dituangkan dalam laporan yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Bappelitbangda atas alokasi sumberdaya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) pengukuran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja ini berfungsi sebagai parameter atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, yang secara simultan juga merupakan media sistematis dalam upaya melakukan diagnose untuk mendeteksi sedini mungkin berbagai kendala/kelemahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*Performing Governance*) dengan skala penilaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91\% \leq 100\%$ | Sangat tinggi |
| 2. | $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| 3. | $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| 4. | $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| 5. | $\leq 50\%$ | Sangat rendah |

Sumber : Tabel T-E.1 (PMDN Nomor 86 Tahun 2017)

Mengacu pada dokumen Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026, tujuan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu:

- a. Peningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Penguatan Kelitbangan Dan Inovasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Setiap tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran dengan indikator kinerja dan targetnya masing-masing sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Target Sasaran Strategis Bappelitbangda Tahun 2022

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Satuan | Target Tahun 2022 |
|----|---|---|--|--------|----------------------|
| 1 | Peningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran | nilai | 37,05 |
| | | | Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$ | persen | 100 |
| | | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP | persen | 100 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Satuan | Target Tahun 2022 |
|----|--|--|--|--------|----------------------|
| | | | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | persen | 100 |
| | | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | persen | 100 |
| 2 | Penguatan kelitbang dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | persen | 100 |
| | | | Persentase implementasi rencana kelitbang | persen | 100 |

Sumber: Renstra-PD Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa terdapat 3 sasaran dengan total 7 indikator kinerja yang diterjemahkan sebagai indikator kinerja utama organisasi. 6 dari 7 Indikator kinerja utama memiliki target mutlak 100 persen. Hal ini merupakan kewajaran dalam penjaminan mutu perencanaan pembangunan di daerah.

3.1.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kab. Kotim

Pengukuran capaian kinerja Bappelitbangda tahun 2021 mengacu pada peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran (kinerja yang seharusnya terjadi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022). Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa Bappelitbangda memiliki 3 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja utama yakni:

| | |
|------------------|---|
| Sasaran 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| IKU 1.1 | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran |
| IKU 1.2 | Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$ |
| Sasaran 2 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah |
| IKU 2.1 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP |
| IKU 2.2 | Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD |
| IKU 2.3 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW |
| Sasaran 3 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah |
| IKU 3.1 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah |
| IKU 3.2 | Persentase implementasi rencana kelitbangan |

Sumber: IKU Bappelitbangda tahun 2021-2026

A. Analisis Capaian Kinerja IKU 1.1 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Terdapat 5 komponen penilaian SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada *outcome*, untuk menunjang hal tersebut diperlukan capaian indikator, adapun capaian indikator tersebut seperti yang terlihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Realisasi IKU 1.1 Tahun 2023

| Indikator Sasaran | Satuan | 2022 | | Jangka Menengah | | |
|---|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Target | Realisasi | Target 2026 | Realisasi (s.d. 2022) | Realisasi (s.d. 2023) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran | nilai | 37,05 | NA | 38,31 | NA | NA |

Sumber: Permenpan- RB

Untuk indikator ini, penilaian SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran, hingga tersusunnya laporan ini hasil evaluasi SAKIP belum dapat disampaikan dalam laporan kinerja tahun 2022, karena belum ada rilis resmi dari Kementerian PAN-RB. Adapun target yang ingin di capai tahun 2022 adalah 37,05 atau dengan nilai kategori BB dengan capaian kinerja 100%. Secara komparatif jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya, peningkatan target mengindikasikan peningkatan kualitas komponen perencanaan dan pengukuran di daerah.

B. Analisis Capaian kinerja IKU 1.2 Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$

Kinerja adalah keluaran/hasil dari sub kegiatan/kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk menghitung IKU 1.2 tersebut digunakan formulasi seperti pada Gambar 3.1 sebagai berikut.

$$IKU\ 1.2 = \frac{Jumlah\ SKPD\ yang\ berkinerja\ \geq\ 76\%}{Jumlah\ SKPD\ di\ Kab.\ Kotim} \times 100\%$$

Gambar 3.1 Formulasi IKU 1.2

Adapun data yang diperlukan untuk menghitung formula dalam Gambar 3.1 di atas dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja SKPD Tahun 2022

| No. | Perangkat Daerah | Capaian Kinerja (%) | |
|-----|---|---------------------|-------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 81,53 | 86,72 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 75,16 | 84,72 |
| 3 | RSUD dr. Murjani | 92,50 | 84,20 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | 85,60 | 79,05 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 86,98 | 88,58 |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 94,60 | 87,26 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 73,23 | 62,40 |
| 8 | Dinas Sosial | 87,67 | 88,03 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 87,38 | 84,06 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 83,91 | 75,37 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 89,75 | 85,57 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 89,12 | 92,01 |
| 13 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 84,58 | 80,82 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 87,36 | 92,24 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 88,67 | 93,68 |
| 16 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 88,83 | 89,05 |
| 17 | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah | 92,31 | 94,81 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 94,46 | 70,07 |
| 19 | Dinas Pemuda Dan Olahraga | 68,29 | 84,81 |
| 20 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata | 78,82 | 87,90 |
| 21 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 88,45 | 92,70 |
| 22 | Dinas Perikanan | 92,30 | 91,85 |
| 23 | Dinas Pertanian | 87,38 | 86,41 |
| 24 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 89,54 | 85,76 |
| 25 | Sekretariat Daerah | 79,43 | 89,23 |
| 26 | Sekretariat Dprd | 87,11 | 92,87 |
| 27 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 78,55 | 92,20 |
| 28 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 84,61 | 81,83 |
| 29 | Badan Pendapatan Daerah | 77,16 | 81,52 |

| No. | Perangkat Daerah | Capaian Kinerja (%) | |
|-----|--|---------------------|-------|
| | | 2021 | 2022 |
| 30 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 73,41 | 68,38 |
| 31 | Inspektorat | 60,03 | 65,82 |
| 32 | Kecamatan Kota Besi | 88,04 | 93,21 |
| 33 | Kecamatan Cempaga | 82,58 | 68,38 |
| 34 | Kecamatan Mentaya Hulu | 68,10 | 88,51 |
| 35 | Kecamatan Parenggean | 87,45 | 85,98 |
| 36 | Kecamatan Baamang | 83,88 | 87,82 |
| 37 | Kecamatan Mentawa Baru Ketapang | 73,90 | 84,66 |
| 38 | Kecamatan Mentaya Hilir Utara | 87,38 | 88,66 |
| 39 | Kecamatan Mentaya Hilir Selatan | 83,10 | 87,73 |
| 40 | Kecamatan Pulau Hanaut | 75,80 | 74,07 |
| 41 | Kecamatan Antang Kalang | 81,31 | 88,02 |
| 42 | Kecamatan Teluk Sampit | 80,54 | 81,71 |
| 43 | Kecamatan Seranau | 78,65 | 83,63 |
| 44 | Kecamatan Cempaga Hulu | 89,46 | 82,09 |
| 45 | Kecamatan Telawang | 87,90 | 76,18 |
| 46 | Kecamatan Bukit Santuai | 91,98 | 92,67 |
| 47 | Kecamatan Tualan Hulu | 93,73 | 91,67 |
| 48 | Kecamatan Telaga Antang | 84,34 | 84,86 |
| 49 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 92,80 | 92,79 |

Sumber: Hasil Evaluasi Akhir Tahun (angka sementara) tahun 2021 dan 2022

Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2022 sebagian besar Perangkat Daerah memiliki capaian kinerja $\geq 76\%$. Selain itu terjadi peningkatan performa kinerja yang terlihat dari penurunan jumlah Perangkat Daerah dengan capaian kinerja $< 76\%$, yaitu 8 Perangkat Daerah di tahun 2021 menjadi 7 Perangkat Daerah di tahun 2022. Jika mengacu pada data yang terdapat pada Tabel 3.4 dan formulasi IKU 1.2 pada Gambar 3.1, maka dapat diperoleh realisasi IKU 1.2 adalah sebesar 85,71%.

Walaupun telah terjadi peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun 2021, namun masih di perlukan dukungan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan *money follow program*, pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh Perangkat Daerah, terutama pada 7 Perangkat Daerah dengan capaian kinerja $< 76\%$

C. Analisis Capaian Kinerja IKU 2.1 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan IKU 2.2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2004 dan PMDN Nomor 86 Tahun 2017 mewajibkan adanya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan yang diukur berdasarkan keselarasan program yang dilaksanakan. Adapun formulasi untuk menghitung IKU 2.1 dan IKU 2.2 berdasarkan PMDN Nomor 86 Tahun 2017 adalah seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

$$IKU\ 2.1 = \frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD Yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$$

$$IKU\ 2.2 = \frac{\text{Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD Yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$$

Gambar 3.2 Formulasi IKU 2.1 dan IKU 2.2

Untuk menghitung formulasi IKU 2.1 dan IKU 2.2 seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 diperlukan data jumlah program yang terdapat di tiap dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah seperti yang dijabarkan pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Pemetaan Jumlah Program Perangkat Daerah Dalam Tiap Dokumen

| No. | Perangkat Daerah | Jumlah Program Dalam | | | % jumlah program RKPD terhadap RPJMD (IKU 2.1) | % jumlah program APBD terhadap RKPD (IKU 2.2) |
|-----|---|----------------------|-----------|-----------|--|---|
| | | RPJMD 2021-2026 | RKPD 2022 | APBD 2022 | | |
| 1 | Dinas Pendidikan | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 3 | RSUD dr. Murjani | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |

| No. | Perangkat Daerah | Jumlah Program Dalam | | | % jumlah program RKPD terhadap RPJMD (IKU 2.1) | % jumlah program APBD terhadap RKPD (IKU 2.2) |
|-----|---|----------------------|-----------|-----------|--|---|
| | | RPJMD 2021-2026 | RKPD 2022 | APBD 2022 | | |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| 8 | Dinas Sosial | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |
| 13 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| 16 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 17 | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| 19 | Dinas Pemuda Dan Olahraga | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 20 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 |
| 21 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| 22 | Dinas Perikanan | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 23 | Dinas Pertanian | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| 24 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 25 | Sekretariat Daerah | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 26 | Sekretariat DPRD | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |

| No. | Perangkat Daerah | Jumlah Program Dalam | | | % jumlah program RKPD terhadap RPJMD (IKU 2.1) | % jumlah program APBD terhadap RKPD (IKU 2.2) |
|-----|---|----------------------|-----------|-----------|--|---|
| | | RPJMD 2021-2026 | RKPD 2022 | APBD 2022 | | |
| 27 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 28 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| 29 | Badan Pendapatan Daerah | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 30 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| 31 | Inspektorat | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| 32 | Kecamatan Kota Besi | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 33 | Kecamatan Cempaga | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 34 | Kecamatan Mentaya Hulu | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 35 | Kecamatan Parenggean | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 36 | Kecamatan Baamang | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 37 | Kecamatan Mentawa Baru Ketapang | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 38 | Kecamatan Mentaya Hilir Utara | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 39 | Kecamatan Mentaya Hilir Selatan | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 40 | Kecamatan Pulau Hanaut | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 41 | Kecamatan Antang Kalang | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 42 | Kecamatan Teluk Sampit | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 43 | Kecamatan Seranau | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 44 | Kecamatan Cempaga Hulu | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 45 | Kecamatan Telawang | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 46 | Kecamatan Bukit Santuai | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 47 | Kecamatan Tualan Hulu | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 48 | Kecamatan Telaga Antang | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 49 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |

Sumber: SIPD (diolah)

Tabel 3.5 memperlihatkan bahwa baik IKU 2.1 maupun IKU 2.2 memiliki hasil pengukuran optimal yakni 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mengacu pada kedua formulasi pada Gambar 3.2, konsistensi program antar dokumen telah terpenuhi. Konsistensi program antar dokumen menjadi hal mutlak yang harus tercapai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 268, PMDN Nomor 86 Tahun 2017. Pencapaian konsistensi program tersebut merupakan *core bussines* Bappelitbangda sebagai institusi perencanaan pembangunan di daerah.

D. Analisis Capaian Kinerja IKU 2.3 Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12, PMDN Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan rencana tata ruang daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035. Adapun formulasi untuk menghitung keselarasan dimaksud telah ditetapkan dalam PMDN Nomor 86 Tahun 2017 seperti yang terlihat pada Gambar 3.3 berikut ini.

$$IKU\ 2.3 = \frac{\text{Kesesuaian program \& kegiatan pembangunan terhadap pola \& struktur ruang}}{\text{Dokumen RTRW}} \times 100\%$$

Gambar 3.3 Formulasi IKU 2.3

Formulasi yang ditunjukkan pada Gambar 3.3 diinterpretasikan bahwa keselarasan yang dimaksud adalah keselarasan program dalam dokumen perencanaan dengan program pembangunan dalam dokumen RTRW yang dalam hal ini dikenal dengan Indikasi Program Utama. Terdapat 3 Indikasi Program Utama dalam RTRW yaitu:

1. Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Struktur Ruang
2. Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang
3. Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Mengacu pada interpretasi tersebut atas, disusun perhitungan program seperti pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Perhitungan Jumlah Program Perencanaan Pembangunan dan RTRW

| Uraian | Jumlah Program |
|--|----------------|
| Jumlah Program dalam RPJMD | 190 |
| Jumlah Indikasi Program Utama dalam Dokumen RTRW | 452 |
| Jumlah Program RPJMD yang sesuai dengan pola dan struktur ruang dalam Indikasi Program Utama | 190 |

Mengacu pada Tabel 3.6 dan formulasi yang ditunjukkan Gambar 3.3, maka dapat disampaikan bahwa realisasi IKU 2.3 untuk tahun 2022 adalah sebesar 100%.

Informasi yang terlihat pada Tabel 4.6 secara tidak langsung membawa premis yakni jika substansi yang terdapat pada Tabel 3.5 digabungkan dengan data yang terdapat pada Tabel 3.6, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dokumen perencanaan yang telah selaras dengan RPJMD secara tidak langsung juga selaras dengan perencanaan tata ruang yang termuat dalam dokumen RTRW. Adapun komparasi capaian IKU 2.3 tahun 2022 terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini

Tabel 3.7
Realisasi IKU 2.3 Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah

| Indikator Sasaran | Satuan | 2022 | | Jangka Menengah | |
|--|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------------|
| | | Target | Realisasi | Target 2026 | Realisasi (s.d. 2022) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | persen | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 3.7 di atas memperlihatkan bahwa target jangka menengah untuk Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW telah tercapai di tahun 2022. Meski demikian, kondisi yang diukur menggunakan indikator ini wajib tetap dipertahankan untuk menjaga kontinuitas keselarasan dokumen perencanaan dengan perencanaan tata ruang di daerah.



E. Analisis Capaian Kinerja IKU 3.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 388, Undang-undang No.23 Tahun 2014 menyatakan dengan jelas bahwa bahwa pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Pasal ini menunjukkan ketegasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan setempat. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 388 yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan,

berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Mengacu pada konstruksi ide tentang inovasi yang dijabarkan di atas dan berpegang pada tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Bappelitbangda, maka pada tahun 2022 dilaksanakan Lomba Kreasi Dan Inovasi (Krenova) Daerah. Ajang ini sebagai sarana untuk memfasilitasi berbagai inovasi dari Perangkat Daerah dan UMKM yang ada di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan Surat Edaran Bupati No/050/03/Bappelitbangda-IV/2022 tentang Lomba kreasi dan Inovasi (Krenova) Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, ada 2 kategori yang dilaksanakan di tahun 2022 yaitu:

1. Kategori Perangkat Daerah :

Topik: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2. Kategori UMKM :

Topik: Kuliner dan Kerajinan

Berdasarkan 2 kategori tersebut di atas telah terdata 23 yang telah lolos kepesertaan seperti yang disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini

Tabel 3.8
Daftar Nama OPD/UMKM yang telah lolos mengikuti seleksi Lomba Krenova Tahun 2022

| No | Kategori Peserta | Nama OPD / Nama UMKM | Bidang Kreasi dan Inovasi | Nama Inovasi / Nama Produk |
|----|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | UMKM | Otak-Otak Bandeng Bu Minah | Kuliner (UMKM) | Otak-Otak Bu Minah |
| 2 | UMKM | Esah Kitchen | Kuliner (UMKM) | Kentang Mustofa / Aneka Tumpeng |
| 3 | UMKM | Uluh Dipah Project | Kuliner (UMKM) | Teh Celup Bajakah Itah |
| 4 | UMKM | Rahayu Porang Center | Kuliner (UMKM) | Mie Porang |
| 5 | UMKM | Rahayu Porang Center | Kuliner dan Kerajinan (UMKM) | Premix PN |
| 6 | UMKM | King Shaomail | Kuliner (UMKM) | Abon Umbut Rotan Rasa Ikan Jelawat |
| 7 | UMKM | PKK Desa Bagendang Tengah | Kuliner (UMKM) | Kue Pay Pakcoy |
| 8 | UMKM | UMKM Gemawira | Kerajinan (UMKM) | Ecoprint HANTINGAN |

| No | Kategori Peserta | Nama OPD / Nama UMKM | Bidang Kreasi dan Inovasi | Nama Inovasi / Nama Produk |
|----|------------------|---|---------------------------|---|
| 9 | UMKM | Minuman sari rempah rempah | Kuliner (UMKM) | Minuman Sari Rempah – Rempah Mbah surif |
| 10 | UMKM | Sri Rejeki | Kuliner (UMKM) | Amplang Jelawat dan Aneka stik Jelawat |
| 11 | UMKM | Teratai Indah (Minarti) | Kuliner (UMKM) | Krupuk Jelawat dan aneka stick jelawat |
| 12 | UMKM | Rabit Roti | Kuliner (UMKM) | Roti Sobek Fresh |
| 13 | UMKM | Jelawat Souvenir Sampit | Kerajinan (UMKM) | Kerajinan Tangan dari Buah Kelampan / Bintaro |
| 14 | UMKM | ANEKA CULINARY SAMPIT by Irma Arman | Kuliner (UMKM) | Uyah Acan |
| 15 | UMKM | Baby Crab Sampit | Kuliner (UMKM) | Baby Crab |
| 16 | OPD | Badan Pendapatan Daerah | Pelayanan Publik | GIS PBB |
| 17 | OPD | Kelurahan Baamang Hilir | Pelayanan Publik | Program Maja Pahari |
| 18 | OPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Pelayanan Publik | Sistem Antrian Vaksin (Ayovaksin) |
| 19 | OPD | SMP Negeri 3 Sampit | Pelayanan Publik | Sampah Emas Hitam |
| 20 | OPD | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pelayanan Publik | Pengaduan Kerusakan Jalan Berbasis Media Sosial (Instagram) |
| 21 | OPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tata Kelola Pemerintahan | Tamu Mentaya (Tamen) |
| 22 | OPD | Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur | Tata Kelola Pemerintahan | Data Dalam Genggaman |
| 23 | OPD | Sekretariat Daerah | Tata Kelola Pemerintahan | Aplikasi E-Beschikking |

Sumber: Laporan Pelaksanaan Lomba Krenova Tahun 2022

Substansi Lomba Krenova merupakan instrumen Pemerintah Daerah melalui Bappelitbangda untuk memfasilitasi perangkat daerah maupun masyarakat untuk lebih produktif, efektif dan efisien, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan bersama.

Pasal 4, PP Nomor 38 Tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat

beberapa bentuk inovasi yaitu:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Ketiga kategori inovasi tersebut di atas telah terpenuhi mengacu pada data kepesertaan yang difasilitasi oleh Bappelitbangda seperti yang tercantum dalam Tabel 3.8



Dokumentasi Fasilitasi Lomba Kreasi dan Inovasi (Krenova)

Berdasarkan konseptualisasi tentang inovasi yang dijabarkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2017 dapat disederhanakan bahwa inovasi merupakan cara baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Konsepsi ini lahir seiring

dengan kemampuan daerah memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi problematika di daerah. Cara-cara baru ini membuat proses menjadi efektif, memangkas prosedur yang tidak diperlukan dan efisiensi anggaran anggaran, serta membuat kapasitas pelaksana semakin berkembang. Konstruksi formulasi disusun mengacu pada PMDN Nomor 86 Tahun 2017 dan berdasarkan penjelasan di atas sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4 berikut ini:

$$IKU\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah Yang Mengikuti}} \times 100\%$$

Gambar 3.4 Formulasi IKU 3.1

Hingga akhir tahun 2022 telah tercatat 10 inovasi Perangkat Daerah yang merupakan manifestasi aktualisasi fasilitasi inovasi melalui Lomba Krenova seperti yang terlihat pada Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Data Implementasi/Aktualisasi Hasil Fasilitasi Lomba Krenova 2022 Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi

| No | SKPD | Implementasi / Aktualisasi | Tahun Penerapan | Status |
|----|----------------|--|-----------------|--------|
| 1 | Dishub | Data Dalam Genggaman (DDG) | 2020 | Aktif |
| 2 | Setda | E-Beschikking | 2020 | Aktif |
| 3 | Bapenda | BUSA PAUD (Buku Saku PAUD) | 2020 | Aktif |
| 4 | Bappelitbangda | Pengelolaan Arsip Secara Elektronik Cepat, Informatif, Tertib, Aman (PARSEL CINTA) | 2020 | Aktif |
| 5 | Setda | Sistem Penyewaan Gedung dan BUS (Sigabus) | 2021 | Aktif |
| 6 | Dinkes | Pos Gizi BUNTING (BUNda Tanggap stuntING) | 2019 | Aktif |
| 7 | Dinsos | Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) | 2022 | Aktif |
| 8 | Dinsos | Optimalisasi Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. | 2022 | Aktif |
| 9 | Bapenda | GIS PBB | 2021 | Aktif |
| 10 | Inspektorat | Layanan Penanganan Pengaduan, Kritik dan Saran Online melalui Google Form | 2021 | Aktif |

Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 3.9 dan formulasi pada Gambar 3.4, maka dapat disampaikan bahwa realisasi IKU 3.1 untuk tahun 2022 adalah sebesar 100%. Jika realisasi ini dikomparasikan dengan target jangka menengah, maka akan terlihat seperti pada Tabel 3.10 berikut ini

Tabel 3.10
Realisasi IKU 3.1 Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah

| Indikator Sasaran | Satuan | 2022 | | Jangka Menengah | |
|--|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------------|
| | | Target | Realisasi | Target 2026 | Realisasi (s.d. 2022) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Lomba Krenova 2022 (diolah)

Tabel 3.10 memperlihatkan bahwa baik target tahun 2022 maupun target jangka menengah untuk IKU 3.1 telah tercapai. Artinya capaian IKU 3.1 untuk target tahun 2022 maupun target jangka menengah adalah sebesar 100%.

F. Analisis Capaian Kinerja IKU 3.2 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Kelitbangan tidak dapat dipisahkan dengan inovasi, secara kelembagaan, substansi kelitbangan akan memperkuat inovasi di daerah. PMDN Nomor 86 Tahun 2017 menerjemahkan penguatan kelitbangan daerah melalui indikator Persentase implementasi rencana kelitbangan yang formulasinya tertulis seperti pada Gambar 3.5 berikut ini.

$$IKU\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah Kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$$

Gambar 3.5 Formulasi IKU 3.1

Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 penelitian dan pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan judul Dampak Replanting Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Kelapa Sawit di kabupaten Kotawaringin Timur. (Studi Empiris: Kecamatan Cempaga Hulu, Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Menataya Hulu). Penelitian ini membahas sejauh mana dampak *replanting* terhadap pekerjaan dan pendapatan petani kelapa sawit serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pekerjaan dan pendapatan petani kelapa sawit selama proses *replanting*. Dari hasil penelitian di dapatkan *replanting* berdampak negatif terhadap pekerjaan dan pendapatan petani kelapa sawit karena dengan adanya *replanting*, dari sisi ekonomi, pendapatan petani menurun dan petani kehilangan pekerjaan utamanya.

Penelitian tersebut di atas merupakan aktualisasi atas target jumlah penelitian yang diimplementasikan dalam dokumen perencanaan jangka pendek maupun dokumen perencanaan jangka menengah. Dengan demikian realisasi IKU 3.2 mengacu pada formulasi dalam Gambar 3.5 untuk tahun 2022 adalah sebesar 100% seperti yang terlihat pada Tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11
Realisasi IKU 3.2 Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah

| Indikator Sasaran | Satuan | 2022 | | Jangka Menengah | |
|---|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------------|
| | | Target | Realisasi | Target 2026 | Realisasi (s.d. 2022) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Persentase implementasi rencana kelitbang | persen | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 3.11 juga memperlihatkan bahwa pencapaian target IKU 3.2 di tahun 2022 telah memenuhi target jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa capaian IKU 3.2 untuk tahun 2022 maupun untuk jangka menengah adalah sebesar 100%

Berbagai penjelasan perhitungan indikator kinerja utama Bappelitbangda yang telah disampaikan di atas menunjukkan bahwa dari 7 indikator kinerja utama terdapat 5 indikator yang memiliki capaian 100%, 1 indikator masih menunggu rilis resmi dari Kementerian PAN-RB, dan 1 indikator dengan capaian 85,71%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.12

berikut ini.

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Strategis Dan kategori Capaian Bappelitbangda Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori | Sumber Data |
|----|--|--|--------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran | nilai | 37,05 | NA | NA | NA | Kementerian PAN-RB |
| | | Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$ | persen | 100 | 85,71 | 85,71 | Tinggi | Perhitungan berdasarkan PMDN 86/2017 |
| | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | persen | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Perhitungan berdasarkan PMDN 86/2017 |
| | | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | persen | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Perhitungan berdasarkan PMDN 86/2017 |
| | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | persen | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Perhitungan berdasarkan PMDN 86/2017 |
| 2 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | persen | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Perhitungan berdasarkan PMDN 86/2017 |
| | | Persentase implementasi rencana kelitbangan | persen | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Perhitungan berdasarkan PMDN 86/2017 |

Sumber Data: Hasil Perhitungan Formulasi Lakip

Tabel 3.12 memperlihatkan bahwa 5 indikator kinerja memiliki capaian dengan kategori sangat tinggi, 1 indikator memiliki capaian dengan kategori tinggi, dan 1 indikator belum dapat diukur karena belum terdapat rilis data resmi dari Kementerian PAN-RB.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan terdapat peningkatan capaian yang secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Strategis Bappelitbangda Tahun 2021-2022

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Satuan | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|----|--|--|--------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| | | | | T | R | C | T | R | C |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran | nilai | 36,83 | 36,55 | 99,24 | 37,05 | NA | NA |
| | | Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$ | persen | 100 | 83,67 | 83,67 | 100 | 85,71 | 85,71 |
| | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase implementasi rencana kelitbang | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber Data: Hasil Perhitungan Formulasi Lakip

Keterangan:

T : target

R : realisasi

C : capaian (realisasi/target)

Tabel 3.12 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini terlihat dari peningkatan capaian dari indikator kinerja utama **Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$** yang meningkat capaiannya dari 83,68% di tahun 2021 menjadi 85,71% di tahun 2022. Jika mengacu pada Tabel E-1, PMDN Nomor 86 Tahun 2017, maka capaian di dua tahun ini masuk pada kategori **Tinggi**. Walaupun telah masuk pada kategori kinerja tinggi, namun capaian indikator tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sektor yang perlu peningkatan yakni **monitoring dan evaluasi kinerja** yang merupakan *core business process* dan menjadi tolok ukur awal pencapaian target kinerja di tiap organisasi.

3.1.2 Capaian Kinerja Jangka Menengah

Monitoring dan evaluasi yang dimaksud di atas tidak hanya dilakukan komparatif pada target tahun capaian, melainkan juga terhadap target akhir yang terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa kinerja yang dilakukan tetap mengarah serta selalu dalam koridor pencapaian target kinerja jangka menengah. Secara rinci capaian tiap indikator kinerja utama terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut.

Tabel 3.14
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Terhadap Target Jangka Menengah

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi Tahun 2022 | Target Akhir Tahun 2026 | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|---|--------|----------------------|-------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) / (6) |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran | nilai | NA | 38,31 | NA |

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi Tahun 2022 | Target Akhir Tahun 2026 | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--|--------|----------------------|-------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) / (6) |
| | Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$ | persen | 85,71 | 100 | 85,71 |
| | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP | persen | 100 | 100 | 100 |
| | | Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD | persen | 100 | 100 | 100 |
| | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | persen | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase implementasi rencana kelitbangan | persen | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Data hasil perhitungan formulasi Lakip

Tabel 3.14 memperlihatkan bahwa dari 7 indikator kinerja utama, terdapat 1 indikator belum dapat diukur karena ketiadaan data resmi dari Kementerian PAB-RB, dan 1 indikator belum mencapai target jangka menengah yakni Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$. Jika mengacu kembali pada Tabel 3.4, belum tercapainya target indikator ini dikarenakan capaian kinerja pada 7 Perangkat Daerah kurang dari 76%. Adapun 7 Perangkat Daerah tersebut adalah

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan capaian kinerja 62,40%
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

- Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan capaian kinerja 75,37%
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian kinerja 70,07%
 4. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan capaian kinerja 68,38%
 5. Inspektorat dengan capaian kinerja 65,82%
 6. Kecamatan Cempaga dengan capaian kinerja 68,38%, dan
 7. Kecamatan Pulau Hanaut dengan capaian kinerja 74,07%

Secara teknis, performa kerja dari tiap Perangkat Daerah adalah ranah internal masing-masing Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus dapat mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat menghambat performa kerja organisasi sekaligus merumuskan alternatif solusi. Dengan demikian performa kerja organisasi secara konsisten terjaga untuk mencapai tujuan jangka menengah Perangkat Daerah. Akan tetapi, Bappelitbangda selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan monev kinerja di tingkat kabupaten harus memastikan bahwa setiap perangkat daerah telah melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja secara periodik.

Selain komparasi dengan target jangka menengah, perlu dilakukan juga komparasi terhadap standar-standar normatif yang menjadi acuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Adapun komparasi realisasi kinerja Bappelitbangda terhadap standar normatif secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Standar Normatif

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Standar Normatif | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|---|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) / (6) |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran | nilai | NA | 55 | NA |

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Standar Normatif | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) / (6) |
| | Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$ | persen | 85,71 | 100 | 85,71 |
| | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP | persen | 100 | 100 | 100 |
| | | Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD | persen | 100 | 100 | 100 |
| | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | persen | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase implementasi rencana kelitbangan | persen | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Data hasil perhitungan formulasi Lakip

Tabel 3.15 memperlihatkan informasi bahwa masih terdapat 2 indikator yang belum mencapai standar normatif yakni:

- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran
- Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$

Dari 2 indikator tersebut di atas, yang secara rasional bisa untuk dilakukan peningkatan dalam periode jangka menengah adalah indikator yang kedua yakni Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$.

Baik Tabel 3.14 maupun Tabel 3.15 keduanya menyiratkan informasi bahwa ada keberhasilan dan juga kegagalan dalam mencapai target pada indikator kinerja utama Bappelitbangda. Secara rinci analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang dapat dilakukan tersaji dalam Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Capaian Tahun 2022 (%) | Analisis Keberhasilan/Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|---|--|------------------------|---|---|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran | NA | Masih menunggu rilis resmi dari Kementerian PAN-RB | Intensifikasi koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam rangka konvergensi pemahaman tentang kinerja dan berbagai mekanismenya |
| | | Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$ | 85,71 | Belum optimalnya monev kinerja sebagai deteksi awal permasalahan | Melaksanakan monev kinerja secara periodik di tiap pokja sebagai upaya awal deteksi permasalahan pencapaian kinerja organisasi |
| | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100 | Hasil implementasi SPBE melalui aplikasi SIPD, serta mengacu pada PMDN 17/2021 dan Kepmendagri 050-4189 | |
| | | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | 100 | Hasil implementasi SPBE melalui aplikasi SIPD, serta mengacu pada PMDN 27/2021 dan Kepmendagri 050-4189 | |
| | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 100 | Hasil implementasi SPBE melalui aplikasi SIPD dan mengacu pada Kepmendagri 050-4189 | |

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran | Capaian Tahun 2022 (%) | Analisis Keberhasilan/Ke gagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|--|--|------------------------|---|-----------------------|
| 2 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 100 | Implementasi perencanaan mengacu pada PP 38/2017 dan Kepmendagri 050-4189 | |
| | | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 100 | Implementasi perencanaan mengacu pada PP 38/2017 dan Kepmendagri 050-4189 | |

Sumber: Data hasil perhitungan formulasi Lakip

Tabel 3.16 memperlihatkan secara sederhana solusi yang bisa diupayakan untuk meningkatkan capaian kinerja di beberapa indikator. Dan tentunya solusi yang tertulis dalam Tabel 3.16 harus dijabarkan ke dalam langkah-langkah operasional yang memiliki *timeline* dan *output* yang jelas. Tabel 3.16 juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pencapaian target kinerja organisasi merupakan proses incremental dari berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang aktualisasinya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Mengacu pada pohon kinerja, tiap sasaran strategis memiliki program, kegiatan, dan sub kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh tiap-tiap unit sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun program penunjang tiap indikator kinerja utama Bappelitbangda secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut ini.

Tabel 3.17
Program Penunjang Tiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappelitbangda
Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian Tahun 2022 (%) | Program | Indikator Kinerja Program | Capaian Indikator Kinerja Program (%) | Menunjang /Tidak Menunjang | | |
|----|---|---|------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran | NA | Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi | 100 | Menunjang | | |
| | | | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD | 100 | Menunjang | | |
| | | | | Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$ | 85,71 | Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi | 100 | Menunjang |
| | | | | | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD | 100 | Menunjang |
| | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD | 100 | Menunjang | | |
| | | | | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | 100 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD | 100 | Menunjang |
| | | | | | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 100 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD |

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian Tahun 2022 (%) | Program | Indikator Kinerja Program | Capaian Indikator Kinerja Program (%) | Menunjang /Tidak Menunjang |
|----|--|--|------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 2 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 100 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Persentase <i>policy brief</i> yang disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan daerah | 100 | Menunjang |
| | | Persentase implementasi rencana kelitbang | 100 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Persentase <i>policy brief</i> yang disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan daerah | 100 | Menunjang |

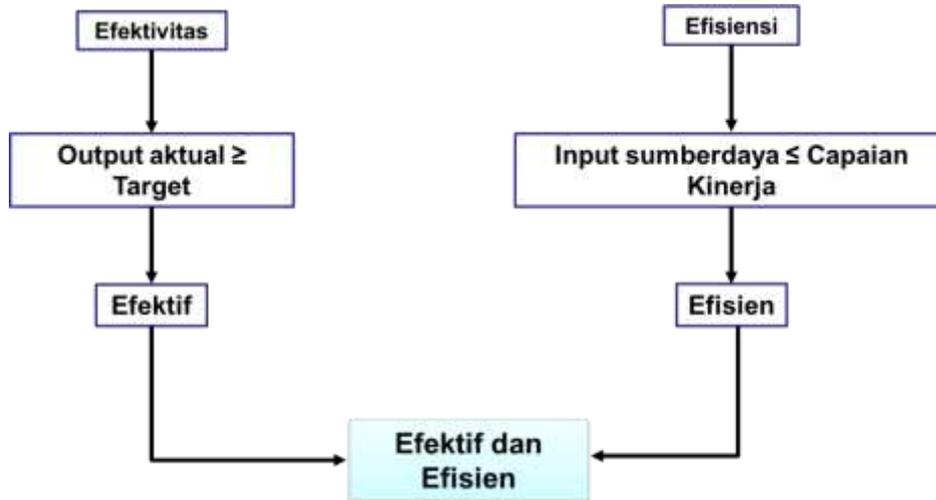
Sumber: Data hasil perhitungan formulasi Lakip

Tabel 3.17 memperlihatkan secara singkat dan sederhana program penunjang dari tiap indikator kinerja sasaran strategis Bappelitbangda Tahun 2022. Keterkaitan program dengan tiap indikator kinerja sasaran strategis mengacu pada Kepmendagri 050-4189 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tabel ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Bappelitbangda tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja program. Program-program yang tercantum dalam Tabel 3.17 tentunya tidak lepas dari tiap kegiatan maupun sub kegiatan yang terkait di dalamnya. Serta harus menjadi kesepahaman bersama bahwa setiap entitas baik itu program, kegiatan, maupun sub kegiatan memiliki dampak langsung, tak langsung, maupun dampak ikutan.

3.2 Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya beserta sumber daya yang digunakan

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara skema, efektivitas dan efisiensi dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini



Gambar 3.6 Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan konsep pada Gambar 3.6 di atas, maka dapat dihitung efisiensi penggunaan sumberdaya di Bappelitbangda Tahun 2022 secara rinci dengan sebelumnya menghitung 2 entitas yakni:

1. Capaian keuangan tahun 2022
2. Capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022

3.2.1 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Bappelitbangda telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis yang merencanakan pembangunan.. Anggaran Bappelitbangda diperuntukkan untuk 4 program 16 kegiatan 54 sub kegiatan. Hingga akhir tahun 2022, realisasi anggaran Bappelitbangda mencapai Rp. 7.506.629.899 atau sebesar 78,55 persen. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di gunakan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Keuangan Bappelitbangda Tahun 2022

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|-----|----|--|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | Bappelitbangda | | 9.556.738.502 | 7.506.629.899 | 78,55 |
| 5 | 0 | | | | | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kab/Kota | Persentase capaian program dan kegiatan, dan capaian kinerja Bappelitbangda | 7.916.403.302 | 5.901.593.618 | 74,55 |
| 5 | 0 | 0 | 01 | 2.0 | | Perencanaan Panggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan | 19.184.250 | 13.673.250 | 71,27 |
| 5 | 0 | 0 | 01 | 2.0 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 17.860.000 | 12.349.000 | 69,14 |
| 5 | 0 | 0 | 01 | 2.0 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | 1.324.250 | 1.324.250 | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 01 | 2.0 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana | 5.993.439.790 | 4.297.864.022 | 71,71 |
| 5 | 0 | 0 | 01 | 2.0 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN Bappelitbangda yang terpenuhi gaji dan tunjangan | 5.991.779.890 | 4.297.337.372 | 71,72 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir tahun | 999.900 | 526.650 | 52,67 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|----------|----|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 2 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 660.000 | - | - |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi | 186.606.000 | 120.788.038 | 64.73 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 5 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan | 44.600.000 | 43.440.000 | 97.40 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 5 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 142.006.000 | 77.348.038 | 54.47 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi | 665.443.850 | 593.835.105 | 89.24 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 6 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan | 17.000.750 | 17.000.750 | 100 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 6 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pengadaan bahan logistik kantor | 4.132.500 | 4.118.750 | 99.67 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 6 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan | 6.250.000 | 2.768.950 | 44.30 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 6 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 37.440.000 | 37.440.000 | 100 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|----------|----------|----------|-----------|------------------|----|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 6 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah pengadaan penyediaan bahan/Material | 78.088.600 | 75.100.000 | 96.17 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 6 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | 39.000.000 | 24.945.500 | 63.96 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 6 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 483.532.000 | 432.461.155 | 89.44 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 7 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi | 123.254.390 | 116.617.631 | 94,62 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 7 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pengadaan kendaraan dinas | | | |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 7 | 01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | | | |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 7 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan | 49.086.380 | 48.380.000 | 98.56 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.0 7 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan kantor yang disediakan | 74.168.010 | 68.237.631 | 92.00 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 20 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | 687.303.272 | 617.300.433 | 89.81 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 20 8 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang dimanfaatkan per tahun | 2.000.000 | 1.000.000 | 50,00 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|------|----|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening yang di bayar dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan kantor per tahun | 210.311.546 | 169.841.785 | 80.76 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum | 474.991.726 | 446.458.648 | 93.99 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi | 241.171.750 | 141.515.139 | 58.68 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah perpanjangan surat dan pajak kendaraan yang dilayani | 95.916.750 | 34.716.339 | 36.19 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara | 25.696.000 | 17.073.800 | 66.45 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan yang berkondisi baik | 107.290.000 | 84.825.000 | 79.06 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan yang berkondisi layak | 12.270.000 | 4.900.000 | 39.93 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | | | Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi | Persentase dokumen perencanaan yang tersusun | 872.480.950 | 804.020.909 | 92.15 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|----------|----|---|--|----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | Pembangunan Daerah | tepat waktu | | | |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 1 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Penyusunan rencana pembangunan yang terpadu dan harmonis dengan menerapkan prinsip partisipasi | 557.243.750 | 529.332.025 | 94.99 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 1 | 02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Terintegrasi data perencanaan dan penganggaran pada Aplikasi SIMRAL/SIPD | 123.696.550 | 114.868.968 | 92.86 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 1 | 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Dokumen hasil Konsultasi | 28.977.900 | 28.942.400 | 99.88 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 1 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Dokumen berita acara hasil Forum gabungan Perangkat Daerah | 39.275.000 | 38.229.978 | 97.34 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 1 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Dokumen BA Kesepakatan hasil musrenbang RKPD | 105.216.600 | 96.883.445 | 92.08 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 1 | 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Dokumen bahan musrenbang RKPD di Kecamatan | 76.995.000 | 69.370.343 | 90.10 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 1 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen penetapan RKPD 2022 dan Perubahan RKPD | 183.082.700 | 181.036.891 | 98.88 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 2 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan | Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan | 118.924.000 | 106.885.987 | 89.88 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|----------|----|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | Pembangunan Daerah | yang dapat diakses oleh masyarakat | | | |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 2 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan serta evaluasi hasil pembangunan | 72.299.000 | 64.473.487 | 89.18 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 2 | 03 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Jumlah Dokumen Buku Rekapitulasi data fisik pembangunan | 46.625.000 | 42.412.500 | 90.97 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 3 | | Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase dokumen yang dapat di jadikan bahan perencanaan | 196.313.200 | 167.802.897 | 85.48 |
| 5 | 5 | 2 | 02 | 2.0 3 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) Tru I, II dan III | 85.335.850 | 71.175.967 | 83.41 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.0 3 | 02 | Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Buku Hasil Evaluasi RKPD, Buku Hasil Laporan Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) dan Buku Hasil Monitoring Kegiatan | 110.977.350 | 96.626.930 | 87,07 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan | 1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD | 684.564.250 | 624.942.791 | 91.29 |



| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|----------|----|--|---|----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | Daerah | 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD | | | |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 1 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 396.046.100 | 359.431.345 | 90.75 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 1 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen draft perencanaan sektoral Bidang Pemerintahan | 16.555.000 | 12.600.000 | 76.11 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 1 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dokumen hasil verifikasi dan validasi usulan/aspirasi Desa/Kelurahan | 67.045.000 | 51.515.075 | 76,84 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 1 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Laporan hasil verifikasi dokumen perencanaan mitra kerja Sub Bidang Pemerintahan | 3.430.000 | 0 | 0 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|----------|----|--|--|----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | Bidang Pemerintahan | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 1 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2. Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) | 206.074.800 | 203.374.574 | 98.69 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 1 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | 5.400.000 | 5.400.000 | 100 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 1 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen hasil Koordinasi perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | 7.250.000 | 7.200.000 | 99.31 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 1 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan hasil verifikasi dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | | 0 | 0 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|----------|----|---|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 1 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 90.291.300 | 79.341.696 | 87.87 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 2 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 113.056.000 | 95.664.265 | 84,62 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 2 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 7.885.000 | 7.835.000 | 99.37 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 2 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 76.114.000 | 61.329.443 | 80,58 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 2 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen Hasil Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang SDA | 5.085.000 | 4.885.000 | 96.07 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 2 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 23.972.000 | 21.614.822 | 90.17 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|------|----|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 175.462.150 | 169.847.181 | 96,80 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Infrastruktur | 12.220.000 | 12.120.000 | 99.18 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen Hasil perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur | | 0 | |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang Infrastruktur | 12.770.100 | 12.348.000 | 96.69 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 150.472.050 | 145.379.181 | 96.62 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|----------|----|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.0 3 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan Dokumen Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang kewilayahan | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | | | | Penelitian Dan Pengembangan | | | | |
| 5 | 5 | 5 | 02 | | | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Persentase jumlah Police brief terhadap jumlah dokumen hasil kajian/penelitian | 83.290.000 | 66.876.950 | 80.29 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.0 1 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.0 1 | 12 | Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan | Jumlah Dokumen review hasil pengelolaan data kelitbangan dan peraturan | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.0 3 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan | 25.000.000 | 16.921.950 | 87.00 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.0 3 | 04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah dokumen review hasil penelitian dan pengembangan, pertanian, perkebunan dan Pangan | 25.000.000 | 16.921.950 | 87.00 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.0 4 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 57.290.000 | 48.955.000 | 85.45 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.0 4 | 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan | | 32.290.000 | 25.126.000 | 83.92 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian keuangan (%) |
|------|---|---|----|------|----|---|---|----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.04 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang | | 25.000.000 | 23.829.000 | 95.32 |

3.2.2 Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Bappelitbangda merupakan proses incremental dari berbagai entitas yakni program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun capaian kinerja dari tiap program, kegiatan, dan sub kegiatan penunjang IKU Bappelitbangda Tahun 2022 tersaji secara rinci pada Tabel 3.19 berikut ini.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang IKU Bappelitbangda Tahun 2022

| Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target kinerja kegiatan tahun 2022 | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Capaian kinerja (%) |
|---|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | |
| Perencanaan | | 100,00 | 99,30 | 99,30 |
| Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu | 100 | 95,20 | 95,20 |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Penyusunan rencana pembangunan yang terpadu dan harmonis dengan menerapkan prinsip partisipasi | 100 | 93,58 | 93,58 |
| Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Terintegrasi data perencanaan dan penganggaran pada Aplikasi SIMRAL/SIPD | 1 dokumen | 0 | 0,00 |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik | Dokumen hasil Konsultasi | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00 |

| Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target kinerja kegiatan tahun 2022 | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Capaian kinerja (%) |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Dokumen berita acara hasil Forum gabungan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Dokumen BA Kesepakatan hasil musrenbang RKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Dokumen bahan musrenbang RKPD di Kecamatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen penetapan RKPD 2022 dan Perubahan RKPD | 3 dokumen | 3 dokumen | 100,00 |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat | 100 | 100 | 100,00 |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan serta evaluasi hasil pembangunan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Jumlah Dokumen Buku Rekapitulasi data fisik pembangunan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase dokumen yang dapat di jadikan bahan perencanaan | 100 | 100 | 100,00 |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) Tru I, II dan III | 3 laporan | 3 laporan | 100,00 |
| Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Buku Hasil Evaluasi RKPD, Buku Hasil Laporan Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) dan Buku Hasil Monitoring Kegiatan | 3 dokumen | 3 dokumen | 100,00 |

| Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target kinerja kegiatan tahun 2022 | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Capaian kinerja (%) |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD | 1. 100% | 1. 100% | 100,00 |
| | 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD | 2. 100% | 2. 100% | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1. 100% | 1. 100% | 100,00 |
| | 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 2. 100% | 2. 100% | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen draft perencanaan sektoral Bidang Pemerintahan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dokumen hasil verifikasi dan validasi usulan/aspirasi Desa/Kelurahan | 17 dokumen | 17 dokumen | 100,00 |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan hasil verifikasi dokumen perencanaan mitra kerja Sub Bidang Pemerintahan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2. Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) | 1. | 1. | 100,00 |
| | | 2. 1 dokumen | 2. 1 dokumen | |

| Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target kinerja kegiatan tahun 2022 | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Capaian kinerja (%) |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen hasil Koordinasi perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | | | 100,00 |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan hasil verifikasi dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | | | 100,00 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 | 100 | 100,00 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 22 laporan | 22 laporan | 100,00 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 4 laporan | 4 laporan | 100,00 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen Hasil Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang SDA | 4 laporan | 4 laporan | 100,00 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 5 laporan | 5 laporan | 100,00 |

| Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target kinerja kegiatan tahun 2022 | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Capaian kinerja (%) |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Wilayah | 100 | 100 | 100,00 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Infrastruktur | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen Hasil perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur | - | - | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang Infrastruktur | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 2 dokumen | 2 dokumen | 100,00 |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah | Laporan Dokumen Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang kewilayahan | | | |
| Penelitian Dan Pengembangan | | | | |
| Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Persentase jumlah Police brief terhadap jumlah dokumen hasil kajian/penelitian | 100 | 100 | 100,00 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan | Jumlah Dokumen review hasil pengelolaan data kelitbangan dan peraturan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |

| Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target kinerja kegiatan tahun 2022 | Realisasi Kinerja Tahun 2022 | Capaian kinerja (%) |
|---|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah dokumen review hasil penelitian dan pengembangan, pertanian, perkebunan dan Pangan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | |
| Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang | Jumlah majalah mediasi | | | |

3.2.3 Efisiensi

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin, efisiensi penggunaan sumberdaya di Bappelitbangda Tahun 2022 secara rinci pada Tabel 3.20 berikut ini

Tabel 3.20
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya di Bappelitbangda Tahun 2022

| Kode | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian kinerja (%) | Capaian keuangan (%) | Tingkat Efisiensi |
|------|----|----|----|------|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 05 | | | | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | |
| 5 | 05 | 01 | | | Perencanaan | | 99,30 | 79,27 | 125,27 |
| 5 | 05 | 01 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kab/Kota | Persentase capaian program dan kegiatan, dan capaian kinerja Bappelitbangda | 100,00 | 80,54 | 124,16 |
| 5 | 05 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan | 100,00 | 74,41 | 134,39 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian kinerja (%) | Capaian keuangan (%) | Tingkat Efisiensi |
|------|----|----|----|------|----|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | perundangan | | | |
| 5 | 05 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 100,00 | 75,37 | 132,68 |
| 5 | 05 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | 100,00 | 48,00 | 208,33 |
| 5 | 05 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana | 100,00 | 83,53 | 119,72 |
| 5 | 05 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN Bappelitbangda yang terpenuhi gaji dan tunjangannya | 100,00 | 88,43 | 113,08 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir tahun | 100,00 | 8,68 | 1.152,70 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 100,00 | 0,00 | NA |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100,00 | 60,10 | 166,38 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan | 100,00 | 92,64 | 107,94 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 100,00 | 34,57 | 289,29 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi | 100,00 | 80,31 | 124,51 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan | 100,00 | 82,91 | 120,61 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pengadaan bahan logistik kantor | 100,00 | 24,35 | 410,65 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian kinerja (%) | Capaian keuangan (%) | Tingkat Efisiensi |
|----------|----------|----------|-----------|-------------|----|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan yang dimanfaatkan | 100,00 | 10,91 | 916,21 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 100,00 | 17,24 | 580,18 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah pengadaan penyediaan bahan/Material | 100,00 | 50,77 | 196,98 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | 100,00 | 129,49 | 77,22 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100,00 | 13,00 | 769,24 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi | 100,00 | 61,04 | 163,82 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pengadaan kendaraan dinas | | | |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | | | |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan | 100,00 | 85,83 | 116,51 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan kantor yang disediakan | 100,00 | 89,18 | 112,14 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | 100,00 | 77,94 | 128,30 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang dimanfaatkan per tahun | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening yang di bayar dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan | 100,00 | 68,79 | 145,37 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian kinerja (%) | Capaian keuangan (%) | Tingkat Efisiensi |
|----------|----------|----------|-----------|-------------|----|---|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | kantor per tahun | | | |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum | 100,00 | 81,49 | 122,71 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi | 100,00 | 38,75 | 258,07 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah perpanjangan surat dan pajak kendaraan yang dilayani | 100,00 | 35,84 | 279,01 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara | 100,00 | 48,11 | 207,84 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan yang ber kondisi baik | 100,00 | 20,04 | 498,95 |
| 5 | 5 | 1 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan yang ber kondisi layak | 100,00 | 34,33 | 291,26 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | | | Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu | 95,20 | 77,64 | 122,61 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Penyusunan rencana pembangunan yang terpadu dan harmonis dengan menerapkan prinsip partisipasi | 93,58 | 80,59 | 116,12 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Terintegrasi data perencanaan dan penganggaran pada Aplikasi SIMRAL/SIPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Dokumen hasil Konsultasi | 100,00 | 84,05 | 118,98 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian kinerja (%) | Capaian keuangan (%) | Tingkat Efisiensi |
|------|---|---|----|------|----|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Dokumen berita acara hasil Forum gabungan Perangkat Daerah | 100,00 | 99,78 | 100,23 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Dokumen BA Kesepakatan hasil musrenbang RKPD | 100,00 | 81,54 | 122,63 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.01 | 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Dokumen bahan musrenbang RKPD di Kecamatan | 100,00 | 55,70 | 179,52 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen penetapan RKPD 2022 dan Perubahan RKPD | 100,00 | 93,40 | 107,07 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat | 100,00 | 66,01 | 151,50 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan serta evaluasi hasil pembangunan | 100,00 | 36,51 | 273,89 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.02 | 03 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Jumlah Dokumen Buku Rekapitulasi data fisik pembangunan | 100,00 | 74,27 | 134,65 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.03 | | Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase dokumen yang dapat di jadikan bahan perencanaan | 100,00 | 70,13 | 142,58 |
| 5 | 5 | 2 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) Tru I, II dan III | 100,00 | 66,41 | 150,57 |
| 5 | 5 | 1 | 02 | 2.03 | 02 | Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Buku Hasil Evaluasi RKPD, Buku Hasil Laporan Koordinasi Kegiatan Pembangunan (Rakordal) dan Buku Hasil Monitoring Kegiatan | 100,00 | 71,90 | 139,07 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian kinerja (%) | Capaian keuangan (%) | Tingkat Efisiensi |
|------|---|---|----|------|----|---|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD | 100,00 | 68,03 | 146,99 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100,00 | 71,80 | 139,27 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen draft perencanaan sektoral Bidang Pemerintahan | 100,00 | 86,68 | 115,37 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.01 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dokumen hasil verifikasi dan validasi usulan/aspirasi Desa/Kelurahan | 100,00 | 92,00 | 108,70 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan hasil verifikasi dokumen perencanaan mitra kerja Sub Bidang Pemerintahan | 100,00 | 19,21 | 520,64 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2. Dokumen Gender | 100,00 | 46,58 | 214,69 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian kinerja (%) | Capaian keuangan (%) | Tingkat Efisiensi |
|------|---|---|----|------|----|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | Analysis Pathway (GAP) | | | |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | 100,00 | 82,54 | 121,15 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.01 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen hasil Koordinasi perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | | | |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan hasil verifikasi dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | | | |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.01 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 100,00 | 86,31 | 115,87 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100,00 | 65,66 | 152,30 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100,00 | 72,24 | 138,43 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.02 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 100,00 | 67,93 | 147,21 |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian kinerja (%) | Capaian keuangan (%) | Tingkat Efisiensi |
|------|---|---|----|------|----|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen Hasil Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang SDA | 100,00 | 34,85 | 286,91 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 100,00 | 67,43 | 148,31 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100,00 | 60,37 | 165,64 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD) | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Infrastruktur | 100,00 | 70,10 | 142,65 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen Hasil perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur | | | |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang Infrastruktur | 100,00 | 59,09 | 169,23 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 100,00 | 58,32 | 171,46 |
| 5 | 5 | 1 | 03 | 2.03 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan Dokumen Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang kewilayahan | | | |
| 5 | 5 | 5 | | | | Penelitian Dan Pengembangan | | | | |

| Kode | | | | | | Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian kinerja (%) | Capaian keuangan (%) | Tingkat Efisiensi |
|------|---|---|----|------|--------|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | | | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Persentase jumlah Police brief terhadap jumlah dokumen hasil kajian/penelitian | 100,00 | 51,68 | 193,50 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelitbang | 100,00 | 68,26 | 146,51 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.01 | 1 2 | Pengelolaan data kelitbang dan peraturan | Jumlah Dokumen review hasil pengelolaan data kelitbang dan peraturan | 100,00 | 68,26 | 146,51 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan | 100,00 | 38,26 | 261,34 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.03 | 0 4 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan | Jumlah dokumen review hasil penelitian dan pengembangan, pertanian, perkebunan dan Pangan | 100,00 | 38,26 | 261,34 |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | |
| 5 | 5 | 5 | 02 | 2.04 | 0 4 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang | Jumlah majalah mediasi | 100,00 | 38,26 | 261,34 |

Tabel 3.20 memperlihatkan bahwa total efisiensi penggunaan sumberdaya Bappelitbangda tahun 2022 dalam mencapai target kinerja utama mencapai 125,27%. Angka ini jauh melebihi kategorisasi yang terdapat pada Tabel E-1, PMDN Nomor 86 Tahun 2017.



BAB 4

Penutup

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) periode 1 tahun. Untuk menggambarkan kinerja Bappelitbangda dan evaluasi terhadap kinerja yang telah di capai berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran juga di laporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Ditahun 2022 Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan sebanyak 3 sasaran dan 7 indikator sesuai dengan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja yang ingin dicapai. Hasil Laporan Kinerja Bappelitbangda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 11 (sebelas) indikator sasaran yang di gunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran Bappelitbangda Kab.Kotim realisasi kinerja sebesar 92,20 %.
2. Berdasarkan data kinerja dan data realisasi keuangan Bappelitbangda Kab.Kotim tahun 2022 terjadi efisiensi anggaran sebesar 125,27 %.
3. Secara umum pencapaian target Bappelitbangda “**Sangat Tinggi**” dan “**Efisien**”, serta tidak mengalami kendala yang sangat signifikan, perubahan kebijakan di tingkat pusat dan perubahan nomenklatur organisasi tidak mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian target.



Meskipun demikian Bappelitbangda Kab.Kotim mempunyai beberapa tantangan dalam menghadapi perencanaan dalam peningkatan kualitas perencanaan. Adapun tantangan tersebut dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kompleksifitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrument monitoring dan evaluasi pembangunan yang bersifat kuantitatif.
2. Ketersediaan data pembangunan yang komprehensif dan kontribusi kegiatan penelitian terhadap pengambilan kebijakan perencanaan.

2. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi merupakan komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai Bappelitbangda untuk menyelesaikan penugasan dalam mencapai target kinerja. Dalam pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil Bappelitbangda Kab.Kotim. Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis maupun faktor internal eksternal yang terjadi.

1. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif antara Bappelitbangda dan Perangkat Daerah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan agar target pencapaian sasaran dapat tercapai sesuai target.
2. Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran daerah dan menyiapkan instrument yang lebih operasional terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPJMD dan RKPJMD.



3. Perlu dilakukan penyesuaian perubahan kebijakan yang mengacu pada peraturan di atasnya, melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait guna mendukung pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan terintegrasi dengan baik yang menghasilkan manfaat jangka panjang ;
4. Sosialisasi peraturan kebijakan inovasi yang di anggarkan secara terjadwal serta melibatkan *stakeholder* terkait.
5. Mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat mendukung proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pembangunan, baik dalam tatanan inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang *out the box* yang berorientasi pada ketepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada.
6. Peningkatan *capacity building* diseluruh Perangkat Daerah secara internal maupun koordinasi antar perangkat daerah dan Bappelitbangda serta melalui sosialisasi dan workshop.

Untuk selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (*benefit*) dan hal utama yang dilakukan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip *good governance* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek/pelaksanaan pembangunan.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang



dicapai dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Hasil laporan capaian kinerja lebih di titikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun *stakeholder* lainnya dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Sebagai penutup, diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bappelitbangda Kab.Kotim, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun -tahun selanjutnya.

Sampit, 11 Januari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

RAFIQ RISWANDI ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741109 199903 1 004

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **H.Halikinnor, S.H., M.M.**

Jabatan : Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR


H.Halikinnor, S.H., M.M.

Pihak Pertama:

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR


RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 19741109 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si**
 NIP : 19741109 199903 1 004
 Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
 Jabatan : KEPALA BADAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Presentase SOPD dengan capaian kinerja $\geq 76\%$ | 36,83 100% |
| 2 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 100% 100% 100% |
| 3 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Presentase implementasi rencana kelitbangan | 100% 100% |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|-------------------|------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | 7.916.403.302 | APBD |
| 2 | Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 872.480.950 | APBD |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 684.564.250 | APBD |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | 83.290.000 | APBD |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR


H.Halikinnor, S.H., M.M.

Pihak Pertama:

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR


RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 19741109 199903 1 004



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Plt. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

SEKRETARIS BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 197411091999031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**
NIP : 197411091999031004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/C)
Jabatan : SEKRETARIS
SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tahun : 2022

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah bidang urusan perencanaan | Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD Nilai LAPKIN Perangkat Daerah | 100% B |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|-----------|---|--------------------------|------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | 7.916.403.302 | APBD |
| | Jumlah | 7.916.403.302 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR.



RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

SEKRETARIS BAPPELITBANGDA KAB.
KOTAWARINGIN TIMUR,



RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 197411091999031004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FAHRUZZAIN , S.T., M.T.**

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Plt. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID LITBANG BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

FAHRUZZAIN , S.T., M.T.
NIP. 19691217 200003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **FAHRUZZAIN , S.T., M.T.**
NIP : 19691217 200003 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tahun : 2022

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase <i>policy brief</i> yang disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan daerah | 100% |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|------------------------------------|-------------------|------|
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | 83.290.000 | APBD |
| | Jumlah | 83.290.000 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

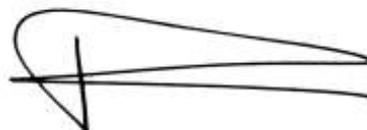
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID LITBANG BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



FAHRUZZAIN , S.T., M.T.
NIP. 19691217 200003 1 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FAHRUZZAIN, S.T., M.T.**

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Plt. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

PLT. KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR,

RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID LITBANG BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

FAHRUZZAIN, S.T., M.T.
NIP. 19691217 200003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **FAHRUZZAIN , S.T., M.T.**
 NIP : 19691217 200003 1 005
 Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
 Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersusunnya rekomendasi kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | <i>Policy brief</i> Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 1 dokumen |
| | Terlaksananya sosialisasi kerjasama ijin penelitian | Jumlah dokumen review hasil kajian Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 1 dokumen |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|-------------------|------|
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 1.000.000 | APBD |
| | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 1.000.000 | APBD |
| | Jumlah | 1.000.000 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

PLT. KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR,



RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID LITBANG BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



FAHRUZZAIN , S.T., M.T.
NIP. 19691217 200003 1 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MANSUR FAHMI, S.H.I.**

Jabatan : Kasubbid. Inovasi dan Teknologi Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **FAHRUZZAIN, S.T.,M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID LITBANG BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

FAHRUZZAIN, S.T., M.T.
NIP. 19691217 200003 1 005

Pihak Pertama:

KASUBBID INOVASI DAN TEKNOLOGI
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

MANSUR FAHMI, S.H.I.
NIP. 19781228 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **MANSUR FAHMI, S.H.I.**
 NIP : 19781228 201001 1 006
 Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
 Jabatan : KEPALA SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

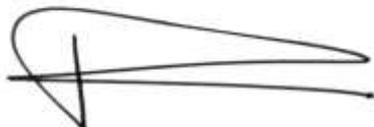
| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengembangan inovasi dan teknologi | <i>Policy brief</i> Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 1 dokumen |
| | Tersedianya publikasi hasil penelitian | Jumlah buku publikasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 2000 eks |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|-------------------|------|
| 1 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 57.290.000 | APBD |
| | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 32.290.000 | APBD |
| | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 25.000.000 | APBD |
| | Jumlah | 57.290.000 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID LITBANG BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



FAHRUZZAIN, S.T., M.T.
NIP. 19691217 200003 1 005

Pihak Pertama:

KASUBBID INOVASI DAN TEKNOLOGI
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



MANSUR FAHMI, S.H.I.
NIP. 19781228 201001 1 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SRI MARDIYANTI, S.Hut.**

Jabatan : Kasubbid. Ekonomi dan Pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **FAHRUZZAIN, S.T.,M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID LITBANG BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

FAHRUZZAIN, S.T., M.T.
NIP. 19691217 200003 1 005

Pihak Pertama:

KASUBBID EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

SRI MARDIYANTI, S.Hut.
NIP. 19740808 200003 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **SRI MARDIYANTI, S.Hut.**
 NIP : 19740808 200003 2 009
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / IIIId
 Jabatan : KEPALA SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

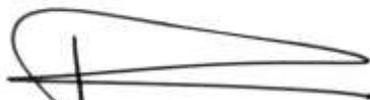
| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersusunnya rekomendasi pengembangan inovasi dan teknologi Terlaksananya penelitian tentang pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | <i>Policy brief</i> Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah dokumen kajian Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 dokumen 1 dokumen |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|-------------------|------|
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 25.000.000 | APBD |
| | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 25.000.000 | APBD |
| | Jumlah | 25.000.000 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID LITBANG BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



FAHRUZZAIN, S.T., M.T.
NIP. 19691217 200003 1 005

Pihak Pertama:

KASUBBID EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



SRI MARDIYANTI, S.Hut.
NIP. 19740808 200003 2 009



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MAULIDAH, S.AP.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Plt. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID P2MPSDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

MAULIDAH, S.AP
NIP. 19740319 199302 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **MAULIDAH, S.AP.**
NIP : 19740319 199302 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : **KABID PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA,
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**
SOPD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Tahun : 2022

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Tingkat keselarasan Renstra PD mitra Bidang P2MPSDA terhadap RPJMD | 100% |
| | | Tingkat keselarasan Renja PD mitra Bidang P2MPSDA terhadap RKPD | 100% |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|-----------|--|--------------------------|------------|
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 509.102.100 | APBD |
| | Jumlah | 509.102.100 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

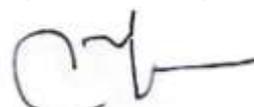
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID P2MPSDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



MAULIDAH, S.AP
NIP. 19740319 199302 2 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **PRISTIAWAN WIBISONO, S.Si., M.Ec.Dev.**

Jabatan : Perencana pada Sub.Bidang Pemerintahan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **MAULIDAH, S.AP.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID P2MPSDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

MAULIDAH, S.AP.
NIP. 19740319 199302 2 002

Pihak Pertama:

KASUBBID PEMERINTAHAN
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

PRISTIAWAN W., S.Si., M.Ec.Dev.
NIP. 19831002 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **PRISTIAWAN WIBISONO, S.Si., M.Ec.Dev.**
 NIP : 19831002 201001 1 004
 Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
 Jabatan : PERENCANA SUB BIDANG PEMERINTAHAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terpenuhinya keselarasan perencanaan sektoral Bidang Pemerintahan | Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan | 100% |
| | | Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD Bidang Pemerintahan | 100% |
| | Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan | Dokumen draft perencanaan sektoral bidang pemerintahan | 1 dokumen |
| | Terlaksananya verifikasi dan validasi usulan desa/kelurahan | Dokumen hasil verifikasi dan validasi usulan/aspirasi Desa/Kelurahan | 17 dokumen |
| | Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan Bidang Pemerintahan | Laporan hasil verifikasi dokumen perencanaan mitra kerja sub bidang pemerintahan | 1 dokumen |
| | Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Pemerintahan | Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Buku Grand Design Pembangunan Kependudukan | 3 dokumen |

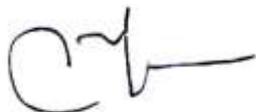
| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|-----------|---|--------------------------|------------|
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 293.104.800 | APBD |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | 16.555.000 | APBD |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan | 67.045.000 | APBD |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan | 3.430.000 | APBD |

| | | | |
|--|--|--------------------|------|
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 206.074.800 | APBD |
| | Jumlah | 293.104.800 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID P2MPSDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



MAULIDAH, S.AP.
NIP. 19740319 199302 2 002

Pihak Pertama:

KASUBBID PEMRINTAHAN
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



PRISTIAWAN W., S.Si., M.Ec.Dev.
NIP. 19831002 201001 1 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WINDAMAI MARLOFI, S.Sos.**

Jabatan : Perencana pad Sub.Bidang Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **MAULIDAH, S.AP.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID P2MPSDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

MAULIDAH, S.AP.
NIP. 19740319 199302 2 002

Pihak Pertama:

KASUBBID PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

WINDAMAI MARLOFI, S.Sos.
NIP. 19680530 200701 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **WINDAMAI MARLOFI, S.Sos.**
 NIP : 19680530 200701 2 010
 Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
 Jabatan : PERENCANA SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terpenuhinya keselarasan perencanaan sektoral Bidang Pembangunan Manusia | Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pembangunan Manusia | 100% |
| | | Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD Bidang Pembangunan Manusia | 100% |
| | Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | 1 dokumen |
| | Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen hasil asistensi penyusunan perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan manusia | 1 dokumen |
| | Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | Laporan hasil verifikasi dokumen perencanaan mitra kerja Sub Bidang Pembangunan Manusia | 1 dokumen |
| | Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 dokumen |

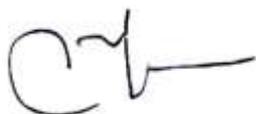
| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|-------------------|------|
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 102.941.300 | APBD |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 5.400.000 | APBD |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 7.250.000 | APBD |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 0 | APBD |

| | | | |
|--|---|--------------------|------|
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 90.291.300 | APBD |
| | Jumlah | 102.941.300 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID P2MPSDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



MAULIDAH, S.AP.
NIP. 19740319 199302 2 002

Pihak Pertama:

KASUBBID PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



WINDAMAI MARLOFI, S.Sos.
NIP. 19680530 200701 2 010



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ADETYA ARGA MARJUANTO, S.T., M.Ling.**

Jabatan : Perencana pada sub.bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **MAULIDAH, S.AP.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian
dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin
Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID P2MPSDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

MAULIDAH, S.AP.
NIP. 19740319 199302 2 002

Pihak Pertama:

KASUBBID PEREKONOMIAN DAN
SDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

ADETYA ARGA M., S.T., M.Ling.
NIP. 19881002 201101 1 0071

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **ADETYA ARGA MARJUANTO, S.T., M.Ling.**
 NIP : 19881002 201101 1 0071
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / IIIb
 Jabatan : PERENCANA SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terpenuhinya keselarasan perencanaan sektoral Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA | 100% |
| | | Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA | 100% |
| | Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian | Laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sektoral bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja PD dan Renstra PD) | 22 Laporan |
| | Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Perekonomian | Laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 4 Laporan |
| | Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang SDA | Laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sektoral bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja PD dan Renstra PD) | 4 Laporan |
| | Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang SDA | Laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 5 Laporan |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|-------------------|------|
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 113.056.000 | APBD |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) | 7.885.000 | APBD |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 76.114.000 | APBD |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) | 5.085.000 | APBD |

| | | | |
|--|---|--------------------|------|
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 23.972.000 | APBD |
| | Jumlah | 113.056.000 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID P2MPSDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



MAULIDAH, S.AP.
NIP. 19740319 199302 2 002

Pihak Pertama:

KASUBBID PEREKONOMIAN DAN
SDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



ADETYA ARGAM., S.T., M.Ling.
NIP. 19881002 201101 1 0071



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JANA H. OJAI, SE, MAP**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Plt. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

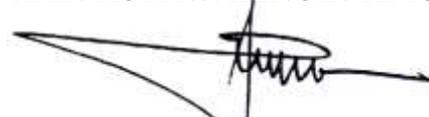
Pihak Kedua:

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID P2EPD BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,


JANA H. OJAI, S.E., M.AP
NIP. 19760407 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **JANA H. OJAI, SE, M.AP**
NIP : 19760407 199703 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tahun : 2022

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Akutabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi (RPJPD, RPJMD, RKPD) | 100% |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp.) | KET |
|----|---|--------------------|------|
| 1 | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 872.480.950 | APBD |
| | Jumlah | 872.480.950 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID P2EPD BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



JANA H. OJAI, S.E., M.AP
NIP. 19760407 199703 1 003



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SUJATMIKA SUAKA MAYAN, S.E.**

Jabatan : Perencana pada sub.bidang Perencanaan dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **JANA, S.E., M.A.P.**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID P2EPD BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

JANA, S.E., M.A.P.
NIP. 19760407 199703 1 003

Pihak Pertama:

KASUBBID PERENCANAAN DAN
PENDANAAN BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

SUJATMIKA SUAKA MAYAN, S.E.
NIP. 19750607 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SUJATMIKA SUAKA MAYAN, S.E.**
 NIP : 19750607 201001 1 007
 Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
 Jabatan : PERENCANA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN
 PENDANAAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA | 100% |
| | Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dengan Dokumen Lainnya | Dokumen penelaahan perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan | 1 dokumen |
| | Terlaksananya Konsultasi Publik | Dokumen Berita Acara hasil Konsultasi Publik | 1 dokumen |
| | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Dokumen Berita Acara Forum SKPD Penyusunan RKPD Dokumen Berita Acara Forum SKPD Penyusunan RPJMD | 2 dokumen |
| | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota | Dokumen Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Dokumen Berita Acara Hasil Musrenbang RPJMD | 2 dokumen |
| | Tersedianya Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Dokumen BA Kesepakatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan | 1 dokumen |
| | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen penetapan RKPD dan Perubahan RKPD serta Dokumen RPJMD | 3 dokumen |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|---|--------------------|------|
| 1 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 557.243.750 | APBD |
| | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dengan Dokumen Lainnya | 123.696.550 | APBD |
| | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 28.977.900 | APBD |

| | | | |
|--|---|--------------------|------|
| | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | 39.275.000 | APBD |
| | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 105.216.600 | APBD |
| | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 76.995.000 | APBD |
| | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 183.082.700 | APBD |
| | Jumlah | 557.243.750 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

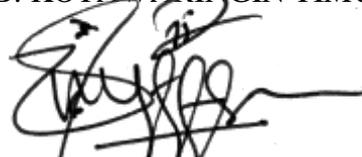
KABID P2EPD BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



IANA, S.E., M.A.P.
NIP. 19760407 199703 1 003

Pihak Pertama:

KASUBBID PEREKONOMIAN DAN
SDA BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



SUJATMIKA SUKA MAYAN, S.E.
NIP. 19750607 201001 1 007



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **EKI DARMA PUTRA, S.T.**

Jabatan : Perencana pada sub.bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **JANA, S.E., M.A.P.**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID P2EPD BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

JANA, S.E., M.A.P.
NIP. 19760407 199703 1 003

Pihak Pertama:

KASUBBID PENGENDALIAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

EKI DARMA PUTRA, S.T.
NIP. 19780312 200904 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **EKI DARMA PUTRA, S.T.**
 NIP : 19780312 200904 1 001
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III_d
 Jabatan : PERENCANA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terlaksananya Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dievaluasi | 100% |
| | Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Laporan hasil pembangunan fisik dan penyerapan anggaran (rakordal) | 3 laporan |
| | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Dokumen data fisik hasil pembangunan tahun anggaran | 3 dokumen |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|--------------------|------|
| 1 | Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 196.313.200 | APBD |
| | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 85.335.850 | APBD |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 110.977.350 | APBD |
| | Jumlah | 196.313.200 | |

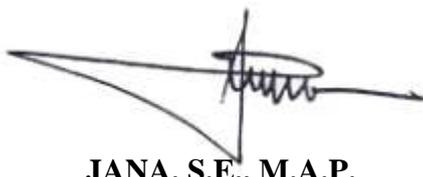
Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Pertama:

KASUBBID PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

Pihak Kedua:

KABID P2EPD BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



JANA, S.E., M.A.P.
NIP. 19760407 199703 1 003



EKI DARMA PUTRA, S.T.
NIP. 19780312 200904 1 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ASQOLANI, S.E.**

Jabatan : Perencana pada sub.bidang Data dan Informasi Bappelitbangda
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **JANA, S.E., M.A.P.**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID P2EPD BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

JANA, S.E., M.A.P.
NIP. 19760407 199703 1 003

Pihak Pertama:

KASUBBID DATA DAN INFORMASI
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

ASQOLANI, S.E.
NIP. 19790924 200904 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **ASQOLANI, S.E.**
 NIP : 19790924 200904 1 001
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III_d
 Jabatan : PERENCANA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase data dan informasi tentang rencana pembangunan yang dapat diakses secara terbuka | 100% |
| | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan serta evaluasi hasil pembangunan | 1 dokumen |
| | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Dokumen data fisik pembangunan | 1 dokumen |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|---|--------------------|------|
| 1 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 118.924.000 | APBD |
| | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 72.299.000 | APBD |
| | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | 46.625.000 | APBD |
| | Jumlah | 118.924.000 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

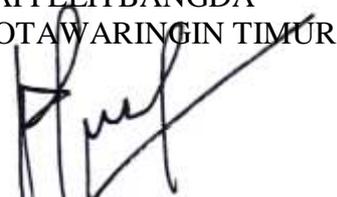
KABID P2EPD BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



JANA, S.E., M.A.P.
NIP. 19760407 199703 1 003

Pihak Pertama:

KASUBBID DATA DAN INFORMASI
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



ASQOLANI, S.E.
NIP. 19790924 200904 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Plt. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID INFRAWIL BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si
NIP. 19810406 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si.**
NIP : 19810406 201001 1 012
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / IIIId
Jabatan : **KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**
SOPD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Tahun : 2022

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Daerah | Tingkat keselarasan Renstra PD mitra Bidang Infrawil terhadap RPJMD | 100% |
| | | Tingkat keselarasan Renja PD mitra Bidang Infrawil terhadap RKPD | 100% |

| NO | PROGRAM | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|-----------|--|--------------------------|------------|
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 175.462.150 | APBD |
| | Jumlah | 175.462.150 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

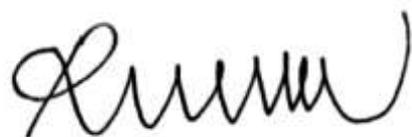
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KABID INFRAWIL BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si
NIP. 19810406 201001 1 012



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WINARNI S.T.**

Jabatan : Perencana pada sub.bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID INFRAWIL BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si
NIP. 19810406 201001 1 012

Pihak Pertama:

KASUBBID PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

WINARNI S.T.
NIP. 19761113 200604 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **WINARNI S.T.**
 NIP : 19761113 200604 2 015
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III_d
 Jabatan : PERENCANA SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Tingkat keselarasan Renstra PD mitra kerja Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap RPJMD | 100% |
| | | Tingkat keselarasan Renja PD mitra kerja Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap RKPD | 100% |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen draf perencanaan pembangunan sektoral bidang Infrastruktur | 1 dokumen |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral bidang Infrastruktur | 1 dokumen |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 1 dokumen |

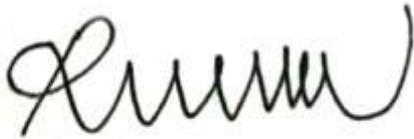
| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|-----------|--|--------------------------|------------|
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 175.462.150 | APBD |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 12.220.000 | APBD |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 12.770.100 | APBD |

| | | | |
|--|---|--------------------|------|
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 150.472.050 | APBD |
| | Jumlah | 175.462.150 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID INFRAWIL BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si
NIP. 19810406 201001 1 012

Pihak Pertama:

KASUBBID PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



WINARNI S.T.
NIP. 19761113 200604 2 015



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HADI IHSAN, S.T., M.Si.**

Jabatan : Perencana pada sub.bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID INFRAWIL BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si
NIP. 19810406 201001 1 012

Pihak Pertama:

KASUBBID PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

HADI IHSAN, S.T. M.Si.
NIP. 19810709 201001 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **HADI IHSAN, S.T., M.Si.**
NIP : 19810709 201001 1 015
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III d
Jabatan : PERENCANA SUB BIDANG PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tahun : 2022

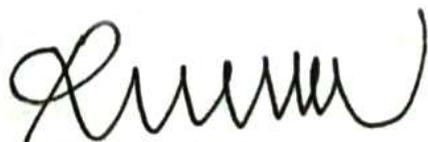
| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Tingkat keselarasan Renstra PD mitra kerja Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renja PD mitra kerja Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap RKPd | 100% 100% |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|-----------------------|-------------------|------|
| 1 | -- | -- | APBD |
| | Jumlah | -- | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID INFRAWIL BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si
NIP. 19810406 201001 1 012

Pihak Pertama:

KASUBBID PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



HADI IHSAN, S.T., M.Si.
NIP. 19810709 201001 1 015



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SAD HENING PRATIWI, S.T.**

Jabatan : Perencana pada sub.bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman
Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID INFRAWIL BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si
NIP. 19810406 201001 1 012

Pihak Pertama:

KASUBBID PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

SAD HENING PRATIWI, S.T.
NIP. 19730513 200604 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SAD HENING PRATIWI, S.T.**
NIP : 19730513 200604 2 010
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III_d
Jabatan : PERENCANA SUB BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tahun : 2022

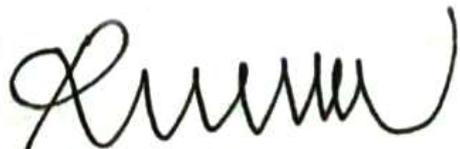
| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Tingkat keselarasan Renstra PD mitra kerja Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renja PD mitra kerja Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman terhadap RKPD | 100% 100% |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|-----------------------|-------------------|------|
| 1 | -- | -- | APBD |
| | Jumlah | -- | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

KABID INFRAWIL BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



RIFARNA MONTAZRIANI, S.T., M.Si
NIP. 19810406 201001 1 012

Pihak Pertama:

KASUBBID PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



SAD HENING PRATIWI, S.T.
NIP. 19730513 200604 2 010



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SUMARI,S.E.**

Jabatan : Kasubbag.Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

SEKRETARIS BAPPELITBANGDA KAB.
KOTAWARINGIN TIMUR,

RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
PELAPORAN BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

SUMARI, S.E.
NIP. 19690302 199403 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SUMARI, S.E**
 NIP : 19690302 199403 1 015
 Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
 Jabatan : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terlaksananya pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan | 100% |
| | • Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah | • Dokumen perencanaan dan penganggaran Bappelitbangda | 1 dokumen |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|--|----------------------|------|
| 1 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.173.428.922 | APBD |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya | 74.168.010 | APBD |
| | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 95.916.750 | APBD |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 107.290.000 | APBD |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.270.000 | APBD |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 142.006.000 | APBD |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 25.695.000 | APBD |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 39.000.000 | APBD |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 474.991.726 | APBD |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 210.311.546 | APBD |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.991.779.890 | APBD |
| | Jumlah | 7.173.428.922 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

Pihak Pertama:

SEKRETARIS BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,


RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 197411091999031004


SUMARI, S.E.
NIP. 19690302 199403 1 015



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **VITA MAYA NURMARINI, S.T., M.AP.**

Jabatan : Plt.Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

SEKRETARIS BAPPELITBANGDA KAB.
KOTAWARINGIN TIMUR,

RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
PELAPORAN BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

VITA MAYA N., S.T., M.AP.
NIP. 19800523 201101 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **VITA MAYA NURMARINI, S.T., M.AP.**
 NIP : 19800523 201101 2 007
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / IIIb
 Jabatan : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan | 100% |
| | Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah | dokumen perencanaan dan penganggaran Bappelitbangda | 5 dokumen |
| | Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | dokumen LAPKIN Bappelitbangda | 1 dokumen |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|-----------|--|--------------------------|------------|
| 1 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.184.250 | APBD |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.860.000 | APBD |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.324.250 | APBD |
| | Jumlah | 19.184.250 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

SEKRETARIS BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 197411091999031004

Pihak Pertama:

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
PELAPORAN BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



VITA MAYA N., S.T., M.AP.
NIP. 19800523 201101 2 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LILY NURULLITA, S.E.**

Jabatan : Kasubbag. Keuangan Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku Atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

SEKRETARIS BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 19741109 199903 1 004

Pihak Pertama:

KASUBBAG. KEUANGAN
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,

LILY NURULLITA, S.E.
NIP. 19780108 200701 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **LILY NURULLITA, S.E.**
 NIP : 19800523 201101 2 007
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III_d
 Jabatan : KASUBBAG. KEUANGAN
 SOPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET |
|----|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana | 100% |
| | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya | 47 orang |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dokumen |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | dokumen laporan keuangan | 4 dokumen |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JML ANGGARAN (Rp) | KET |
|----|---|----------------------|------|
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.993.439.790 | APBD |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.991.779.890 | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 999.900 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 660.000 | APBD |
| | Jumlah | 5.993.439.790 | |

Sampit, 3 Januari 2022

Pihak Kedua:

SEKRETARIS BAPPELITBANGDA KAB.
KOTAWARINGIN TIMUR,



RAFIQ RISWANDI, ST., M.Si.
NIP. 19741109 199903 1 004

Pihak Pertama:

KASUBBAG. KEUANGAN
BAPPELITBANGDA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



LILY NURULLITA, S.E.
NIP. 19780108 200701 2 011



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas program-program Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, RPJPD merupakan pedoman dalam menyusun RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, dengan ini perlu dilakukan penyusunan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);

MENETAPKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021-2026**

Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbangda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bab II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah pengesahan Tujuan Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022-2026;
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022-2026.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Renstra- Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- b. Pengendalian dan Evaluasi Renstra-Perangkat Daerah Tahun 2022-2026.

Bab III RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2022 serta memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan unsur Pemerintahan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 7

- (1) Menetapkan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :
 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 3. RSUD dr. Murjani Sampit;
 4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 8. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Timur;
 11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
 15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
 19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
 20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
 21. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 23. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
 24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur;
 25. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 26. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
 27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;
 31. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 32. Kecamatan Kota Besi;
 33. Kecamatan Cempaga;
 34. Kecamatan Mentaya Hulu;
 35. Kecamatan Parenggean;
 36. Kecamatan Baamang;
 37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
 38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
 39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
 40. Kecamatan Pulau Hanaut;

41. Kecamatan Antang Kalang
42. Kecamatan Teluk Sampit
43. Kecamatan Seranau
44. Kecamatan Cempaga Hulu
45. Kecamatan Telawang
46. Kecamatan Bukit Santuai
47. Kecamatan Tualan Hulu
48. Kecamatan Telaga Antang
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur;

Pasal 8

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 menjadi landasan penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bab IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur .

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 23 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

FAJURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD GUMIRING, SH
NIP. 19690612 199903 1 007

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (APBD)
BAPPELITBANGDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PER 31 DESEMBER 2022

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | JUMLAH PAGU ANGGARAN | TOTAL REALISASI | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|---------------|-----------|--------|
| | | | KEUANGAN | | FISIK (%) | |
| | | | (Rp) | (%) | | |
| 5 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| 5 01 | BAPPELITBANGDA | 9.556.738.502 | 7.506.629.899 | 78,55 | 92,20 | |
| 5 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 7.916.403.302 | 5.901.593.618 | 74,55 | 90,34 | |
| 5 01 01 2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.184.250 | 13.673.250 | 71,27 | 100,00 | |
| 5 01 01 2.01 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.860.000 | 12.349.000 | 69,14 | 100,00 | |
| | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 17.860.000 | 12.349.000 | 69,14 | 100,00 |
| | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 17.860.000 | 12.349.000 | 69,14 | 100,00 |
| 5 01 01 2.01 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.324.250 | 1.324.250 | 100,00 | 100,00 | |
| | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 1.324.250 | 1.324.250 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.324.250 | 1.324.250 | 100,00 | 100,00 |
| 5 01 01 2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.993.439.790 | 4.297.864.022 | 71,71 | 88,32 | |
| 5 01 01 2.02 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.991.779.890 | 4.297.337.372 | 71,72 | 100,00 | |
| | 5 1 01 01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 3.194.339.890 | 2.430.695.689 | 76,09 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 01 0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 2.386.352.612 | 1.800.276.080 | 75,44 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 02 0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 218.730.260 | 164.665.657 | 75,28 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 03 0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 200.910.080 | 176.555.000 | 87,88 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 04 0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 50.050.000 | 40.930.000 | 81,78 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 05 0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 66.570.000 | 41.825.000 | 62,83 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 06 0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 142.000.040 | 110.295.660 | 77,67 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 07 0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 7.420.000 | 5.294.818 | 71,36 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 08 0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 2.253.318 | 24.247 | 1,08 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 09 0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 100.370.040 | 76.052.203 | 75,77 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 10 0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 6.046.320 | 3.694.225 | 61,10 | 100,00 |
| | 5 1 01 01 11 0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 13.637.220 | 11.082.799 | 81,27 | 100,00 |
| | 5 1 01 02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 2.797.440.000 | 1.866.641.683 | 66,73 | 75,00 |
| | 5 1 01 02 01 0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 2.797.440.000 | 1.866.641.683 | 66,73 | 75,00 |
| 5 01 01 2.02 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 999.900 | 526.650 | 52,67 | 100,00 | |
| | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 999.900 | 526.650 | 52,67 | 100,00 |
| | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis | 999.900 | 526.650 | 52,67 | 100,00 |
| 5 01 01 2.02 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 660.000 | - | - | - | |
| | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 660.000 | - | - | |
| | 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis | 660.000 | - | - | |
| 5 01 01 2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 186.606.000 | 120.788.038 | 64,73 | 96,98 | |
| 5 01 01 2.05 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 44.600.000 | 43.440.000 | 97,40 | 100,00 | |
| | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 44.600.000 | 43.440.000 | 97,40 | 100,00 |
| | 5 1 02 01 01 0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 1 02 01 01 0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 40.600.000 | 39.440.000 | 97,14 | 100,00 |
| 5 01 01 2.05 09 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 142.006.000 | 77.348.038 | 54,47 | 96,03 | |
| | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 142.006.000 | 77.348.038 | 54,47 | 96,03 |
| | 5 1 02 02 12 0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 25.000.000 | 14.500.000 | 58,00 | 80,00 |
| | 5 1 02 04 01 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 113.816.000 | 60.978.038 | 53,58 | 100,00 |
| | 5 1 02 04 01 0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.190.000 | 1.870.000 | 58,62 | 80,00 |
| 5 01 01 2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 665.443.850 | 593.835.105 | 89,24 | 97,35 | |
| 5 01 01 2.06 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 17.000.750 | 17.000.750 | 100,00 | 100,00 | |
| | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 17.000.750 | 17.000.750 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 1 02 01 01 0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 17.000.750 | 17.000.750 | 100,00 | 100,00 |
| 5 01 01 2.06 04 | Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.132.500 | 4.118.750 | 99,67 | 100,00 | |
| | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 4.132.500 | 4.118.750 | 99,67 | 100,00 |
| | 5 1 02 01 01 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.132.500 | 4.118.750 | 99,67 | 100,00 |
| 5 01 01 2.06 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan | 6.250.000 | 2.768.950 | 44,30 | 100,00 | |
| | 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 6.250.000 | 2.768.950 | 44,30 | 100,00 |

| KODE | | | | | | | | | | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | JUMLAH PAGU ANGGARAN | TOTAL REALISASI | | | |
|------|----|----|------|-----|---|---|----|----|----|---|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | KEUANGAN | | | FISIK (%) |
| | | | | | | | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis | 6.250.000 | 2.768.950 | 44,30 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | 37.440.000 | 37.440.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 37.440.000 | 37.440.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 37.440.000 | 37.440.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 007 | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | 78.088.600 | 75.100.000 | 96,17 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 78.088.600 | 75.100.000 | 96,17 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 26.093.500 | 23.788.900 | 91,17 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 44.099.100 | 43.509.500 | 98,66 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 7.896.000 | 7.801.600 | 98,80 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 08 | | | | | | | Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 39.000.000 | 24.945.500 | 63,96 | 80,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 39.000.000 | 24.945.500 | 63,96 | 80,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 35.000.000 | 22.145.500 | 63,27 | 80,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 4.000.000 | 2.800.000 | 70,00 | 80,00 |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | | | | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 483.532.000 | 432.461.155 | 89,44 | 97,96 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 483.532.000 | 432.461.155 | 89,44 | 97,96 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 473.672.000 | 432.461.155 | 91,30 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.860.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 5 | 01 | 01 | 2,07 | | | | | | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 123.254.390 | 116.617.631 | 94,62 | 98,82 |
| 4 | 01 | 01 | 2,07 | 10 | | | | | | | Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.086.380 | 48.380.000 | 98,56 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 01 | | | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 01 | 03 | 07 | 0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | 680.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 2 | 02 | | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48.406.380 | 47.700.000 | 98,54 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 2 | 02 | 10 | 01 | 0002 | Belanja Modal Personal Computer | 40.183.880 | 39.670.000 | 98,72 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 2 | 02 | 10 | 02 | 0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 8.222.500 | 8.030.000 | 97,66 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 5 | 01 | 01 | 2,07 | 11 | | | | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 74.168.010 | 68.237.631 | 92,00 | 98,04 |
| | | | | | 5 | 1 | 01 | | | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 01 | 03 | 07 | 0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | 680.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 9.830.000 | 6.062.000 | 61,67 | 85,19 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 7.280.000 | 3.737.000 | 51,33 | 80,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.550.000 | 2.325.000 | 91,18 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 2 | 02 | | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 63.658.010 | 61.495.631 | 96,60 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 2 | 02 | 06 | 01 | 0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 39.820.000 | 39.120.000 | 98,24 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 2 | 02 | 10 | 02 | 0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 15.374.260 | 15.180.000 | 98,74 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 2 | 02 | 10 | 02 | 0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 8.463.750 | 7.195.631 | 85,02 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 5 | 01 | 01 | 2,08 | | | | | | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 687.303.272 | 617.300.433 | 89,81 | 95,59 |
| 5 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 1.000.000 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 2.000.000 | 1.000.000 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2.000.000 | 1.000.000 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 5 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 210.311.546 | 169.841.785 | 80,76 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 210.311.546 | 169.841.785 | 80,76 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0059 | Belanja Tagihan Telepon | 3.000.000 | 889.296 | 29,64 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0061 | Belanja Tagihan Listrik | 162.266.546 | 148.216.648 | 91,34 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 45.045.000 | 20.735.841 | 46,03 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 5 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 474.991.726 | 446.458.648 | 93,99 | 97,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 01 | | | | Belanja Pegawai | 245.300.000 | 237.400.000 | 96,78 | 90,12 |
| | | | | | 5 | 1 | 01 | 03 | 07 | 0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola | 221.060.000 | 220.640.000 | 99,81 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 01 | 03 | 07 | 0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 8.160.000 | 680.000 | 8,33 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 01 | 03 | 08 | 0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan | 16.080.000 | 16.080.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 229.691.726 | 209.058.648 | 91,02 | 97,36 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 135.200 | - | - | - |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9.969.300 | 9.794.300 | 98,24 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.000.000 | 4.286.500 | 85,73 | 90,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 108.429.208 | 98.387.750 | 90,74 | 95,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 8.250.000 | 7.500.000 | 90,91 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 54.214.604 | 50.198.000 | 92,59 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | - | - | - | - |

| KODE | | | | | | | | | | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | JUMLAH PAGU ANGGARAN | TOTAL REALISASI | | | |
|------|----|----|------|----|---|---|----|----|----|---|---|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | KEUANGAN | | | FISIK (%) |
| | | | | | | | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 27.107.302 | 25.099.000 | 92,59 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 14.592.000 | 12.448.498 | 85,31 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 604.800 | 597.600 | 98,81 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 02 | 0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 1.389.312 | 747.000 | 53,77 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 1 | 2,09 | | | | | | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 241.171.750 | 141.515.139 | 58,68 | 96,11 |
| 5 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 95.916.750 | 34.716.339 | 36,19 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 95.916.750 | 34.716.339 | 36,19 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18.636.750 | 16.866.919 | 90,50 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 77.280.000 | 17.849.420 | 23,10 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | | | | | | | Sub Kegiatan enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 25.695.000 | 17.073.800 | 66,45 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 25.695.000 | 17.073.800 | 66,45 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6.895.000 | 6.610.000 | 95,87 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 18.800.000 | 10.463.800 | 55,66 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2,09 | 10 | | | | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 107.290.000 | 84.825.000 | 79,06 | 97,99 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 107.290.000 | 84.825.000 | 79,06 | 97,99 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat | 2.160.000 | - | - | - |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal | 10.950.000 | 2.525.000 | 23,06 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- | 5.520.000 | 1.000.000 | 18,12 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 03 | 03 | 0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan | 88.660.000 | 81.300.000 | 91,70 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2,09 | 11 | | | | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.270.000 | 4.900.000 | 39,93 | 41,23 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 12.270.000 | 4.900.000 | 39,93 | 41,23 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 1.250.000 | 768.000 | 61,44 | 75,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 7.190.000 | 1.680.000 | 23,37 | 50,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1.830.000 | 1.152.000 | 62,95 | 80,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 03 | 02 | 0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2.000.000 | 1.300.000 | 65,00 | 80,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | | | | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 872.480.950 | 804.020.909 | 92,15 | 98,13 |
| 5 | 01 | 02 | 2,01 | | | | | | | | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 557.243.750 | 529.332.025 | 94,99 | 100,00 |
| 5 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 123.696.550 | 114.868.968 | 92,86 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 123.696.550 | 114.868.968 | 92,86 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis | 3.784.550 | - | - | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.280.000 | 7.560.000 | 91,30 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0004 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | - | - | - | - |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 111.632.000 | 103.524.418 | 92,74 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2,01 | 03 | | | | | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik | 28.977.900 | 28.942.400 | 99,88 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 28.977.900 | 28.942.400 | 99,88 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis | 11.823.400 | 11.822.900 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan | 228.300 | 228.300 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan | 91.200 | 91.200 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15.035.000 | 15.000.000 | 99,77 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0007 | Honorarium Rohaniwan | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2,01 | 04 | | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | 39.275.000 | 38.229.978 | 97,34 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 39.275.000 | 38.229.978 | 97,34 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9.625.000 | 9.615.000 | 99,90 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 16.010.000 | 16.000.000 | 99,94 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0007 | Honorarium Rohaniwan | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 100,00 |

| KODE | | | | | | | | | | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | JUMLAH PAGU ANGGARAN | TOTAL REALISASI | | | |
|------|--|--|--|--|---|----|----|------|----|---|---|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | KEUANGAN | | | FISIK (%) |
| | | | | | | | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | - | - | - | - |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.840.000 | 11.814.978 | 92,02 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 105.216.600 | 96.883.445 | 92,08 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 105.216.600 | 96.883.445 | 92,08 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 49.258.600 | 48.851.200 | 99,17 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | - | - | - | - |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | - | - | - | - |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 27.250.000 | 27.200.000 | 99,82 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0007 | Honorarium Rohaniwan | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 25.908.000 | 18.032.245 | 69,60 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 06 | | Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 76.995.000 | 69.370.343 | 90,10 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 76.995.000 | 69.370.343 | 90,10 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis | 8.295.000 | 8.295.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 65.880.000 | 58.555.343 | 88,88 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.820.000 | 2.520.000 | 89,36 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 07 | | Sub Kegiatan koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 183.082.700 | 181.036.891 | 98,88 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 183.082.700 | 181.036.891 | 98,88 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 81.382.700 | 80.720.500 | 99,19 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 90.660.000 | 90.620.000 | 99,96 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.040.000 | 9.696.391 | 87,83 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 5 | 01 | 02 | 2,02 | | | Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 118.924.000 | 106.885.987 | 89,88 | 96,85 |
| | | | | | 5 | 1 | 2 | 2,02 | 01 | | Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 72.299.000 | 64.473.487 | 89,18 | 98,89 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 72.299.000 | 64.473.487 | 89,18 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.425.000 | 990.000 | 40,82 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 16.750.000 | 15.520.000 | 92,66 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 03 | 02 | 01 | 0007 | Honorarium Rohaniwan | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 52.324.000 | 47.163.487 | 90,14 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 5 | 1 | 2 | 2,02 | 02 | | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | 46.625.000 | 42.412.500 | 90,97 | 93,68 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 46.625.000 | 42.412.500 | 90,97 | 80,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.725.000 | 1.112.500 | 64,49 | 80,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 31.900.000 | 31.300.000 | 98,12 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 13.000.000 | 10.000.000 | 76,92 | 80,00 |
| | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 2,03 | | | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 196.313.200 | 167.802.897 | 85,48 | 93,58 |
| | | | | | 5 | 1 | 2 | 2,03 | 01 | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 85.335.850 | 71.175.967 | 83,41 | 92,55 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 85.335.850 | 71.175.967 | 83,41 | 92,55 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.495.850 | 1.290.000 | 51,69 | 75,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 38.250.000 | 30.000.000 | 78,43 | 85,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0007 | Honorarium Rohaniwan | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 42.190.000 | 37.485.967 | 88,85 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 5 | 1 | 2 | 2,03 | 03 | | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 110.977.350 | 96.626.930 | 87,07 | 94,38 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 110.977.350 | 96.626.930 | 87,07 | 94,38 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 19.197.350 | 17.545.000 | 91,39 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 25.500.000 | 24.000.000 | 94,12 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 800.000 | 800.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0007 | Honorarium Rohaniwan | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 59.830.000 | 51.881.930 | 86,72 | 95,00 |

| KODE | | | | | | | | | | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | JUMLAH PAGU ANGGARAN | TOTAL REALISASI | | | | |
|------|---|---|------|----|--|---|---|----|----|---|----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | KEUANGAN | | | FISIK (%) | |
| | | | | | | | | | | | | (Rp) | (%) | | | |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.250.000 | - | - | - |
| 5 | 1 | 3 | | | | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 684.564.250 | 624.942.791 | 91,29 | 96,99 |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | | | | | | | | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 396.046.100 | 359.431.345 | 90,75 | 96,21 |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 01 | | | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 16.555.000 | 12.600.000 | 76,11 | 82,45 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 16.555.000 | 12.600.000 | 76,11 | 82,45 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.905.000 | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.650.000 | 12.600.000 | 92,31 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 02 | | | | | | | | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 67.045.000 | 51.515.075 | 76,84 | 95,23 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 67.045.000 | 51.515.075 | 76,84 | 95,23 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.195.000 | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 63.850.000 | 51.515.075 | 80,68 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 03 | | | | | | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 3.430.000 | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 3.430.000 | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.430.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 04 | | | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 206.074.800 | 203.374.574 | 98,69 | 99,66 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 206.074.800 | 203.374.574 | 98,69 | 99,66 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.978.800 | 5.961.000 | 85,42 | 90,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | - | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | - | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim | - | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0007 | Honorarium Rohaniwan | - | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0009 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan | 118.000.000 | 117.993.000 | 99,99 | 100,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 81.096.000 | 79.420.574 | 97,93 | 100,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 05 | | | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 5.400.000 | 5.400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 5.400.000 | 5.400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | - | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.400.000 | 5.400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 06 | | | | | | | | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 7.250.000 | 7.200.000 | 99,31 | 100,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 7.250.000 | 7.200.000 | 99,31 | 100,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | - | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.250.000 | 7.200.000 | 99,31 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,01 | 08 | | | | | | | | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 90.291.300 | 79.341.696 | 87,87 | 90,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 90.291.300 | 79.341.696 | 87,87 | 90,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9.026.300 | 2.800.000 | 31,02 | 80,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.825.000 | 7.860.000 | 72,61 | 80,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 0007 | Honorarium Rohaniwan | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 69.640.000 | 68.681.696 | 98,62 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,02 | | | | | | | | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 113.056.000 | 95.664.265 | 84,62 | 98,02 |
| 5 | 1 | 3 | 2,02 | 01 | | | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 7.885.000 | 7.835.000 | 99,37 | 100,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | | | | Belanja Barang Jasa | 7.885.000 | 7.835.000 | 99,37 | 100,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.835.000 | 1.835.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.050.000 | 6.000.000 | 99,17 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | |

| KODE | | | | | | | | | | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | | | | JUMLAH PAGU ANGGARAN | TOTAL REALISASI | | | |
|------|---|---|------|----|---|---|----|----|----|---|--|-------------|-------------|----------------------|-----------------|-----|--|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | KEUANGAN | | | FISIK (%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,02 | 04 | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 76.114.000 | 61.329.443 | 80,58 | 97,06 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | Belanja Barang Jasa | 76.114.000 | 61.329.443 | 80,58 | 97,06 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.050.000 | 3.250.000 | 64,36 | 75,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.900.000 | 800.000 | 20,51 | 75,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 67.164.000 | 57.279.443 | 85,28 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,02 | 05 | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 5.085.000 | 4.885.000 | 96,07 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | Belanja Barang Jasa | 5.085.000 | 4.885.000 | 96,07 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.835.000 | 1.835.000 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.250.000 | 3.050.000 | 93,85 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,02 | 08 | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 23.972.000 | 21.614.822 | 90,17 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | Belanja Barang Jasa | 23.972.000 | 21.614.822 | 90,17 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 23.972.000 | 21.614.822 | 90,17 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,03 | | | | | | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 175.462.150 | 169.847.181 | 96,80 | 98,09 | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,03 | 01 | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 12.220.000 | 12.120.000 | 99,18 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | Belanja Barang Jasa | 12.220.000 | 12.120.000 | 99,18 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 520.000 | 520.000 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.700.000 | 11.600.000 | 99,15 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,03 | 03 | | | | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 12.770.100 | 12.348.000 | 96,69 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | Belanja Barang Jasa | 12.770.100 | 12.348.000 | 96,69 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 480.100 | 480.000 | 99,98 | 100,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.250.000 | 3.023.000 | 93,02 | 60,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9.040.000 | 8.845.000 | 97,84 | 30,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | - | - | #DIV/0! | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2,03 | 04 | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 150.472.050 | 145.379.181 | 96,62 | 97,77 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | Belanja Barang Jasa | 150.472.050 | 145.379.181 | 96,62 | 97,77 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 703.050 | - | - | - | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.275.000 | 9.250.000 | 69,68 | 80,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 135.374.000 | 135.009.181 | 99,73 | 100,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.120.000 | 1.120.000 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 5 | 5 | 2 | | | | | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | 83.290.000 | 66.876.950 | 80,29 | 89,86 | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 2,01 | | | | | | | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 2,01 | 12 | | | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | Belanja Barang Jasa | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 2,03 | | | | | | | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 25.000.000 | 16.921.950 | 67,69 | 87,00 | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 2,03 | 04 | | | | | | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 25.000.000 | 16.921.950 | 67,69 | 87,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | Belanja Barang Jasa | 25.000.000 | 16.921.950 | 67,69 | 87,00 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.860.000 | 4.998.950 | 72,87 | 100,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.500.000 | 450.000 | 6,92 | 50,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 04 | 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.640.000 | 11.473.000 | 98,57 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 2,04 | | | | | | | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 57.290.000 | 48.955.000 | 85,45 | 90,93 | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 2,04 | 01 | | | | | | Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 32.290.000 | 25.126.000 | 77,81 | 83,92 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | | | Belanja Barang Jasa | 32.290.000 | 25.126.000 | 77,81 | 83,92 | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.375.000 | 1.430.000 | 42,37 | 50,00 | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 540.000 | 516.000 | 95,56 | 100,00 | | | |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | JUMLAH PAGU ANGGARAN | TOTAL REALISASI | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | KEUANGAN | | FISIK (%) |
| | | | (Rp) | (%) | |
| 5 1 02 01 01 0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 3.750.000 | 3.450.000 | 92,00 | 100,00 |
| 5 1 02 01 01 0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.375.000 | 1.480.000 | 23,22 | 45,00 |
| 5 1 02 02 01 0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | - | - | - | - |
| 5 1 02 05 01 0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 13.250.000 | 13.250.000 | 100,00 | 100,00 |
| 5 5 2 2,04 04 | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang | 25.000.000 | 23.829.000 | 95,32 | 100,00 |
| 5 1 02 | Belanja Barang Jasa | 25.000.000 | 23.829.000 | 95,32 | 100,00 |
| 5 1 02 01 01 0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.560.000 | 6.409.000 | 97,70 | 100,00 |
| 5 1 02 01 01 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.500.000 | 6.400.000 | 98,46 | 100,00 |
| 5 1 02 02 01 0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.100.000 | 3.100.000 | 100,00 | 100,00 |
| 5 1 02 02 01 0007 | Honorarium Rohaniwan | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| 5 1 02 04 01 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.640.000 | 5.640.000 | 100,00 | 100,00 |
| 5 1 02 04 01 0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 2.800.000 | 1.880.000 | 67,14 | 100,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 9.556.738.502 | 7.506.629.899 | 78,55 | 91,53 |

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



RAFIQ RISWANDI,S.T.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
19741109 199903 1 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

UNIT SKPD : BAPPELITBANGDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Nilai Sakip Komponen Perencanaan dan pengukuran | 37,05 |
| | | Persentase SOPD dengan capaian kinerja \geq 76% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd | 100% |
| | | Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD | 100% |
| | | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 100% |
| 3 | Menguatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 100% |
| | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbang | 100% |

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



RAFIQ RISWANDI, S.T., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
19741109 199903 1 004

RENCANA AKSI BAPPELITBANGDA TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | SASARAN | | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KEGIATAN | ANGGARAN | KET |
|----|---|----------------------|---|---|-------------|--|----------------------|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | |
| | | | | | | | 9.578.428.452 | |
| | SASARAN 1 | | | | | | | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | SAKIP Bappelitbangda | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 7.938.093.252 | |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 40.874.200 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | Tw 1: 53,87% Tw 2: Tw 3: 46,13% Tw 4: | 17.860.000 | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 1.324.250 | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 5.993.439.790 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 5.991.779.890 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 999.900 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 660.000 | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 186.606.000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 44.600.000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Orang | Tw 1: 46% Tw 2: 16% Tw 3: 16% Tw 4: 22% | 142.006.000 | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 665.443.850 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket | Tw 1: 72,41% Tw 2: 27,59% Tw 3: Tw 4: | 17.000.750 | |

| NO | SASARAN | | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KEGIATAN | ANGGARAN | KET |
|----|---------|-------------------|---|---|---------|---|--------------------|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Paket | Tw 1: 50,45% Tw 2: 49,55% Tw 3: Tw 4: | 4.132.500 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggunaan | Paket | Tw 1: 59,41% Tw 2: 40,59% Tw 3: Tw 4: | 6.250.000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dokumen | Tw 1: 24,04% Tw 2: 24,04% Tw 3: 48,08% Tw 4: 3,85% | 37.440.000 | |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | Paket | Tw 1: 64,14% Tw 2: 35,86% Tw 3: Tw 4: | 78.088.600 | |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | Tw 1: 66,67% Tw 2: 33,33% Tw 3: Tw 4: | 39.000.000 | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | Tw 1: 42,08% Tw 2: 28,96% Tw 3: 28,96% Tw 4: | 483.532.000 | |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 123.254.390 | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 49.086.380 | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 74.168.010 | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 687.303.272 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 2.000.000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Laporan | Tw 1: 41,11% Tw 2: 29,36% Tw 3: 29,53% Tw 4: | 210.311.546 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | Tw 1: 58,39% Tw 2: 27,86% Tw 3: 13,75% Tw 4: | 474.991.726 | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 241.171.750 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | Tw 1: 56,03% Tw 2: 2,36% Tw 3: 41,61% Tw 4: | 95.916.750 | |

| NO | SASARAN | | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KEGIATAN | ANGGARAN | KET |
|----|---|---|---|--|--------------|---|--------------------|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | Tw 1: 61,80% Tw 2: 38,20% Tw 3: Tw 4: | 25.695.000 | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | Tw 1: 50,56% Tw 2: 39,69% Tw 3: 9,75% Tw 4: | 107.290.000 | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 12.270.000 | |
| | SASARAN 2 | | | | | | | |
| | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Tingkat Keselarasan dokumen RKPD terhadap RPIMD | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 872.480.950 | |
| | | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | 557.243.750 | |
| | | | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain | Dokumen | Tw 1: 26,88% Tw 2: 73,12% Tw 3: Tw 4: | 123.696.550 | |
| | | | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Terlaksananya Konsultasi Publik | Berita Acara | Tw 1: 53,46% Tw 2: 19,94% Tw 3: 26,60% Tw 4: | 28.977.900 | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 39.275.000 | |
| | | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | Tw 1: 91,27% Tw 2: 8,73% Tw 3: Tw 4: | 105.216.600 | |
| | | | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan | Usulan | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 76.995.000 | |
| | | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | Tw 1: Tw 2: 19,42% Tw 3: 73,54% Tw 4: 7,05% | 183.082.700 | |
| | | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 118.924.000 | |
| | | | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Masukan | Tw 1: 13,84% Tw 2: 50,87% Tw 3: Tw 4: 35,29% | 72.299.000 | |

| NO | SASARAN | | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KEGIATAN | ANGGARAN | KET |
|----|---|---|---|---|------------------|--|--------------------|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | |
| | | | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | Orang | Tw 1: 38,15% Tw 2: 61,85% Tw 3: Tw 4: | 46.625.000 | |
| | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 196.313.200 | |
| | | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Laporan | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 85.335.850 | |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Laporan | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 110.977.350 | |
| | SASARAN 2 | | | | | | | |
| | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah | Rata-rata capaian target kinerja program pembangunan daerah | | | | | | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 684.564.250 | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | 396.046.100 | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | Tw 1: 89,03% Tw 2: 10,97% Tw 3: Tw 4: | 16.555.000 | |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Perangkat Daerah | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 67.045.000 | |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | Tw 1: Tw 2: Tw 3: 40,97% Tw 4: 59,03% | 3.430.000 | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | Tw 1: 36,42% Tw 2: 31,34% Tw 3: 21,23% Tw 4: 11,01% | 206.074.800 | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 5.400.000 | |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Perangkat Daerah | Tw 1: 100% Tw 2: Tw 3: Tw 4: | 7.250.000 | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | Tw 1: 43,61% Tw 2: 56,39% Tw 3: Tw 4: | 90.291.300 | |

| NO | SASARAN | | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KEGIATAN | ANGGARAN | KET |
|----|--|-------------------|--|--|------------------|---|--------------------|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | 113.056.000 | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | Tw 1: 83,88% Tw 2: 16,12% Tw 3: Tw 4: | 7.885.000 | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Laporan | Tw 1: 36,45% Tw 2: 24,16% Tw 3: 39,39% Tw 4: | 76.114.000 | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | Tw 1: 85,29% Tw 2: 14,71% Tw 3: Tw 4: | 5.085.000 | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Laporan | Tw 1: 10,35% Tw 2: 79,69% Tw 3: 9,96% Tw 4: | 23.972.000 | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | 175.462.150 | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | Tw 1: 83,19% Tw 2: 16,81% Tw 3: Tw 4: | 12.220.000 | |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Perangkat Daerah | Tw 1: 62,84% Tw 2: 37,16% Tw 3: Tw 4: | 12.770.100 | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | Tw 1: 40,60% Tw 2: 59,40% Tw 3: Tw 4: | 150.472.050 | |
| | SASARAN 3 | | | | | | | |
| | Menguatnya peran Litbang dan Implementasi Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | 83.290.000 | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | 1.000.000 | |
| | | | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik | Laporan | Tw 1: 52,69% Tw 2: Tw 3: 47,31% Tw 4: | 1.000.000 | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | 25.000.000 | |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Dokumen | Tw 1: Tw 2: 78,93% Tw 3: 21,07% Tw 4: | 25.000.000 | |
| | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | 57.290.000 | |

| NO | SASARAN | | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KEGIATAN | ANGGARAN | KET |
|----|---------|-------------------|--|--|---------|---|------------|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | |
| | | | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen | Tw 1: 6,80% Tw 2: 93,20% Tw 3: Tw 4: | 32.290.000 | |
| | | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Laporan | Tw 1: Tw 2: 100% Tw 3: Tw 4: | 25.000.000 | |

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



RAFIQ RISWANDI, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741109 199903 1 004

PIAGAM PENGHARGAAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Memberikan penghargaan kepada:
**Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Atas prestasinya sebagai 10 besar Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP tertinggi dengan predikat "BB" (Sangat Baik) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

Sampit, 29 Desember 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

H.HALIKINNOR, S.H.,M.M.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



PIAGAM PENGHARGAAN

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Memberikan Penghargaan Kepada:

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Atas prestasinya sebagai 5 besar Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi tertinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

Sampit, 29 Desember 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

H. HALIKINNOR, S.H., M.M.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

JL. JEND. SUDIRMAN KM 5.5 TELP (0531) 21254 KOTAK POS 31 SAMPIT

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Staf progress Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023
Hari/Tanggal : 12 Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Sei Cempaga BAPPELITBANGDA Kabupaten Kotawaringin Timur
Pemimpin Rapat : Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Kotawaringin Timur
Notulis : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Hasil Pembahasan :

1. Progress Kinerja :

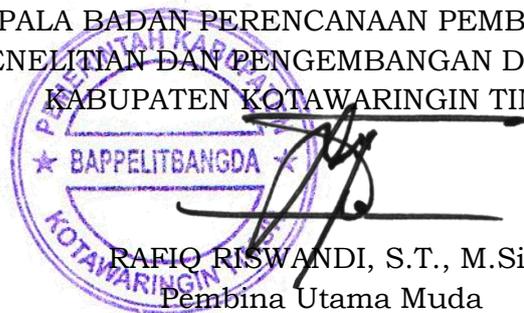
1) Progress Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meminta agar realisasi program dan kegiatan baik Fisik dan Keuangan agar segera dimaksimalkan pada Triwulan ke III karena masih banyak realisasi yang belum mencapai 50% dan diharapkan pada Triwulan ke III target realisasi meningkat sebesar 85% baik realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan Rencana Aksi Bappelitbangda Tahun 2022;
- b. Setiap 3 bulan sekali Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengharapkan ada rapat pembahasan evaluasi dan monitoring realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan terkait tindak lanjut sasaran tujuan indikator kinerja utama Bappelitbangda berdasarkan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026.

2. Tindaklanjut :

- a. Diharapkan disetiap akhir bulan per tgl 25 setiap PPTK agar dapat mengumpulkan hasil realisasi kepada Kasubag Perencanaan & Pelaporan sebagai evaluasi dan monitoring rencana kerja Bappelitbangda Tahun 2022.
- b. Untuk Mengatasi belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan dilakukan evaluasi per 3 bulan dengan mengadakan rapat internal di lingkungan Bappelitbangda.
- c. Peran Kelitbangan dalam perencanaan telah dilakukan optimalisasi baik dari segi penelitian serta memfasilitasi inovasi Perangkat Daerah.
- d. Dalam Menyusun laporan kinerja telah melibatkan partisipasi dari seluruh pegawai sesuai dengan tanggungjawab dari tugas dan fungsi masing-masing pegawai.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



RAFIQ RISWANDI, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19741109 199903 1 004

